

A background image showing a business meeting. Several people in dark suits and white shirts are seated around a table. Their hands are visible, gesturing as if in conversation. There are white coffee cups on the table. The image has a dark, slightly blurred aesthetic with some circular graphic overlays in shades of blue and grey.

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate  
Governance

4

# Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

## Basis of GCG Implementation

Perseroan terus berupaya untuk memaksimalkan lima prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebagai landasan operasional Perseroan sehari-hari. Hal tersebut dilandasi atas kesadaran Perseroan akan pentingnya penerapan prinsip GCG dalam upaya pencapaian visi dan misi Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi Perseroan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan perusahaan yang transparan dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan GCG yang baik akan memperkuat kepercayaan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

### Landasan Hukum Penerapan GCG

Penerapan GCG Perseroan mengacu pada standar dan pedoman GCG yang ditetapkan melalui serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
3. Peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, atau peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia atau regulator pasar modal lainnya.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

The Company continuously strives to optimize five basic principles of GCG such as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness as foundation of the Company's daily operations. This is based on the Company's awareness of the importance of GCG principles implementation in achieving the Company's vision and mission. Implementation of GCG principles in the Company's organization is based on a commitment to create a transparent and trusted company through accountable business management. Good GCG implementation will strengthen trust and increase value for shareholders and other stakeholders.

### Legal Framework of GCG Implementation

GCG implementation in the Company refers to GCG standards and guidelines established through a series of regulations according to Republic of Indonesia Law and Financial Services Authority (OJK) as follows:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT).
2. Law Number 8 of 1995 on Capital Markets (UUPM).
3. Capital Market Regulations issued by Financial Services Authority (OJK, or regulations previously issued by BAPEPAM-LK), Indonesia Stock Exchange or other capital market regulators.
4. Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.

5. Anggaran Dasar Perseroan.
6. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG).
7. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Bagi Perseroan, tujuan penerapan GCG adalah untuk :

1. Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja Organ Perseroan yaitu antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan kepada Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan;
3. Menjadi dasar implementasi dan pengembangan Budaya Perseroan;
4. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, alokasi sumber daya Perseroan dan pengelolaan risiko yang efektif sehingga menjamin peningkatan nilai Perseroan yang berkelanjutan;
5. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Perseroan serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

## Mekanisme GCG

Perseroan secara konsisten telah mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas operasionalnya melalui rangkaian kebijakan dan peraturan internal yang komprehensif, antara lain, Piagam GCG, Kode Etik, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Kebijakan Nominasi, kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, dan berbagai kebijakan operasional yang selaras dengan praktik GCG terbaik.

5. Articles of Association of the Company.
6. General Guidelines for Good Corporate Governance Indonesia issued by the National Committee on Corporate Governance (KNKG).
7. Roadmap of Corporate Governance Indonesia issued by OJK.

The Company has set the GCG implementation goals, as follows:

1. To direct and control the Company's Organ working relationships, namely between Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Increase the accountability of the Company's management to the Shareholders while also considering interests of the stakeholders;
3. As framework for Corporate Culture implementation and development;
4. To encourage and support business development, allocation of Company resources and effective risk management so as to ensure an increase in the Company's sustainable value;
5. To direct the achievement of the Company's vision and mission as well as increasing the professionalism of human resources;

## GCG Mechanism

The Company has consistently applied the principles of GCG in its operational activities through a comprehensive set of internal policies and regulations, including, the GCG Charter, the Code of Ethics, the Board of Commissioners 'Guidelines and Charter, the Board of Directors' Guidelines and Charter, Nomination Policy, System Policy Reporting of violations, and various operational policies that are in line with best GCG practices.

## Struktur Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance Structure

Efektivitas penerapan GCG akan berjalan dengan kuatnya struktur dan sistem yang memberikan perlindungan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya semaksimal mungkin. Karena itu struktur dan sistem GCG Perseroan didasarkan pada:

### Prinsip-prinsip GCG

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan mengacu pada lima prinsip dasar GCG yang meliputi:

- a. **Transparansi**, dimana Perusahaan senantiasa memberikan informasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, kreditur dan pihak-pihak yang terkait, mengenai kejadian penting Perusahaan, termasuk laporan kinerja keuangan Perusahaan.
- b. **Akuntabilitas**, dengan adanya fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ Perusahaan yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS, berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.
- c. **Pertanggungjawaban**, dimana Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.
- d. **Kemandirian**, melalui pengelola Perusahaan secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

The effectiveness of the implementation of GCG will run with the strength of structures and systems that provide protection of the interests of shareholders and other stakeholders as much as possible. Therefore, the Company's GCG structure and system are based on:

### GCG Principles

The implementation of good corporate governance by the Company that is approved in the five basic principles of GCG published:

- a. **Transparency**, where the Company always provides information to shareholders, stakeholders, creditors and related parties regarding important Company events, including the Company's financial performance reports.
- b. **Accountability**, with the existence of functions, duties, and responsibilities of the Company's organs, namely the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the GMS, run in accordance with their authority, so that the management of the Company runs transparently, fairly, effectively and efficiently.
- c. **Responsibility**, where the Company always adheres to the provisions of the Company's Articles of Association as well as prevailing laws and regulations, and ethical values.
- d. **Independence**, through management of the Company independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party.

e. **Kewajaran**, bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

e. **Fairness**, that in carrying out its activities, the Company always pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of justice and equality

## Visi dan Misi Perusahaan

### Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pembiayaan yang handal dalam industri keuangan di Indonesia.

### Misi Perusahaan

Menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan, serta membangun dan berkembang bersama wirausahawan lokal yang berkeinginan tinggi.

### Nilai-nilai utama Perusahaan

Menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, menghormati seluruh pemangku kepentingan, mempraktekkan profesionalisme yang tinggi, dan memiliki karakter yang jujur.

## Penilaian Penerapan GCG

Perseroan meyakini bahwa penerapan tata kelola yang baik merupakan landasan keberlanjutan Perusahaan dari waktu ke waktu. Untuk itu, Perseroan berupaya mengimplementasikan program-program tata kelola yang baik agar menjadi budaya korporasi dan karyawan.

Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan budaya keseharian Perusahaan yang sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku, guna mencapai tata kelola perusahaan yang baik (GCG), diantara dengan:

## Company Vision and Mission

### Company Vision

Become finance company in the financial industry in Indonesia.

### Company Mission

Creating employment and prosperity, as well as building and developing with high-desire local entrepreneurs.

### The Company's main values

Enforcement of GCG, respect all stakeholders, practice high professionalism and have honest character.

## GCG Assessment

The Company believes implementation of good governance is the foundation of the Company's sustainability every time. Therefore, the Company strives to implement good governance programs to become the corporate and employee culture.

The Company has made various efforts to create a daily corporate culture in accordance with prevailing ethics and legal rules, in order to achieve good corporate governance (GCG), including:

1. Menandatangani Pernyataan Kepatuhan atas *Code of Conduct*.
2. Melakukan pembayaran pajak pribadi.
3. Melaporkan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi dan anggota keluarganya untuk menghindari *conflict of interest* secara konsisten di setiap tahun.
4. Meningkatkan efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System - WBS*) dengan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk.
5. Melakukan sosialisasi atas hasil survei GCG tahun 2019.
6. GCG dan aturan perilaku (*Code of Conduct*).

## Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Perseroan telah memenuhi rekomendasi sesuai Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang terdiri dari penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sign the Statement of Compliance with the Code of Conduct.
2. As personal tax payment.
3. Reporting the Special Register of Shareholders of the Board of Directors and their family members to avoid conflicts of interest consistently every year.
4. Increasing the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS) by following up on every incoming report.
5. To socialize the results of the 2019 GCG survey.
6. GCG and the Code of Conduct.

## Implementation of Governance Guideline for Public Company

The Company has complied recommendations according to Financial Service Authority Regulation (POJK) No.21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Governance Guideline for Public Company and Financial Service Authority Circular Letter (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guideline for Public Company comprising of implementation of 5 (five) aspects, 8 (eight) principles tata good corporate governance principles as well as 25 (twenty five) recommendations of the good corporate governance aspects and principles implementation based on "*comply or explain*" approach, as follows:

## Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspects and Good Corporate Governance

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka Aspects and Good Corporate Governance		Keterangan Description
<b>A.</b>	<b>HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.</b>	<b>PUBLIC COMPANY RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS IN GUARANTEEING THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS;</b>
	<b>Prinsip 1</b> Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	<b>Principle 1</b> Increase the Value of Holding GMS
	Rekomendasi:	Recommendation:
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	The Public Company has technical methods or procedures for voting both openly and closed, which prioritizes the independence and interests of shareholders.
		Terpenuhi Comply
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.
		Terpenuhi Comply
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs <i>Web</i> Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.
		Terpenuhi Comply
	<b>Prinsip 2</b> Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	<b>Principle 2</b> Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.
	Rekomendasi:	Recommendation:
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.
		Terpenuhi Comply
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs <i>Web</i> .	The Public Company discloses the communication policy of the Public Company with shareholders or investors on the Website.
		Terpenuhi Comply
<b>B.</b>	<b>FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS</b>	<b>FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</b>
	<b>Prinsip 3</b> Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	<b>Principle 3</b> Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners
	Rekomendasi:	Recommendation:



## Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspects and Good Corporate Governance

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka Aspects and Good Corporate Governance		Keterangan Description	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company.	Terpenuhi Comply
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Determination of the composition of members of the Board of Commissioners has considered diversity of expertise, knowledge and experience needed.	Terpenuhi Comply
	<b>Prinsip 4</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	<b>Principle 4</b> Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	
	Rekomendasi:	Recommendation:	
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	The Board of Commissioners has a Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Commissioners.	Terpenuhi Comply
4.2	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	The Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Commissioners is expressed through the Company's Annual Report	Terpenuhi Comply
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.	Terpenuhi Comply
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function composes a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.	Terpenuhi Comply
<b>C.</b>	<b>FUNGSI DAN PERAN DIREKSI</b>	<b>FUNCTION AND ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS</b>	
	<b>Prinsip 5</b> Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	<b>Principle 5</b> Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	
	Rekomendasi:	Recommendation:	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and effectiveness in decision-making.	Terpenuhi Comply

## Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspects and Good Corporate Governance

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka Aspects and Good Corporate Governance		Keterangan Description
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience needed.
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	The member of the Board of Directors in charge of accounting or finance has expertise and/or knowledge in the field of accounting.
	<b>Prinsip 6</b> Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	<b>Principle 6</b> Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.
	Rekomendasi:	Recommendation:
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi.	The Board of Directors has a Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Directors.
6.2	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	The Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Directors is expressed through the Company's Annual Report.
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.
<b>D.</b>	<b>PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>STAKEHOLDER PARTICIPATION</b>
	<b>Prinsip 7</b> Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	<b>Principle 7</b> Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.
	Rekomendasi:	Recommendation:
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	The Public Company has a policy to prevent insider trading.
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	The Public Company has a policy regarding the selection and improvement of the ability of suppliers or vendors.

## Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Aspects and Good Corporate Governance

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka Aspects and Good Corporate Governance			Keterangan Description
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	The Public Company has a policy on fulfilling the rights of creditors.	Terpenuhi Comply
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	The Public Company has a whistleblowing system policy.	Terpenuhi Comply
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	The Public Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	Terpenuhi Comply
<b>E.</b>	<b>KETERBUKAAN INFORMASI</b>	<b>INFORMATION DISCLOSURE</b>	
	<b>Prinsip 8</b> Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	<b>Principle 8</b> Improving the Implementation of Information Disclosure.	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	The Public Company utilizes the use of information technology more broadly than the Website as a medium for information disclosure.	Terpenuhi Comply
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	The Annual Report of the Public Company discloses the final beneficial owner in the ownership of the Public Company of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the shareholding of the Public Company through major and controlling shareholders.	Terpenuhi Comply

# Organ Perseroan

## Corporate Organs

Terdapat tiga organ sebagai pilar utama pelaksana GCG yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ tersebut terikat pada tugas dan tanggung jawabnya serta senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya. Selain itu dalam menjalankan pengelolaan Perseroan dan mengambil segala keputusan, Organ Perseroan senantiasa menjunjung tinggi nilai etika bisnis & etika kerja serta menyadari adanya tanggung jawab Perseroan terhadap para pemangku kepentingan.

Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ utama dalam struktur tata kelola Perseroan. Rujukan utama organ perusahaan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi.
- c. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan

There are three organs as the main pillars of implementing GCG consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The three organs are bound to their duties and responsibilities and always comply with statutory provisions, the Company's Articles of Association and other provisions. In addition to carrying out the management of the Company and making all decisions, the Organs of the Company always uphold the values of business ethics & work ethics and are aware of the Company's responsibility to its stakeholders

The General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors are the main organs in the Company's governance structure. The main reference for company organs is Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company, namely that:

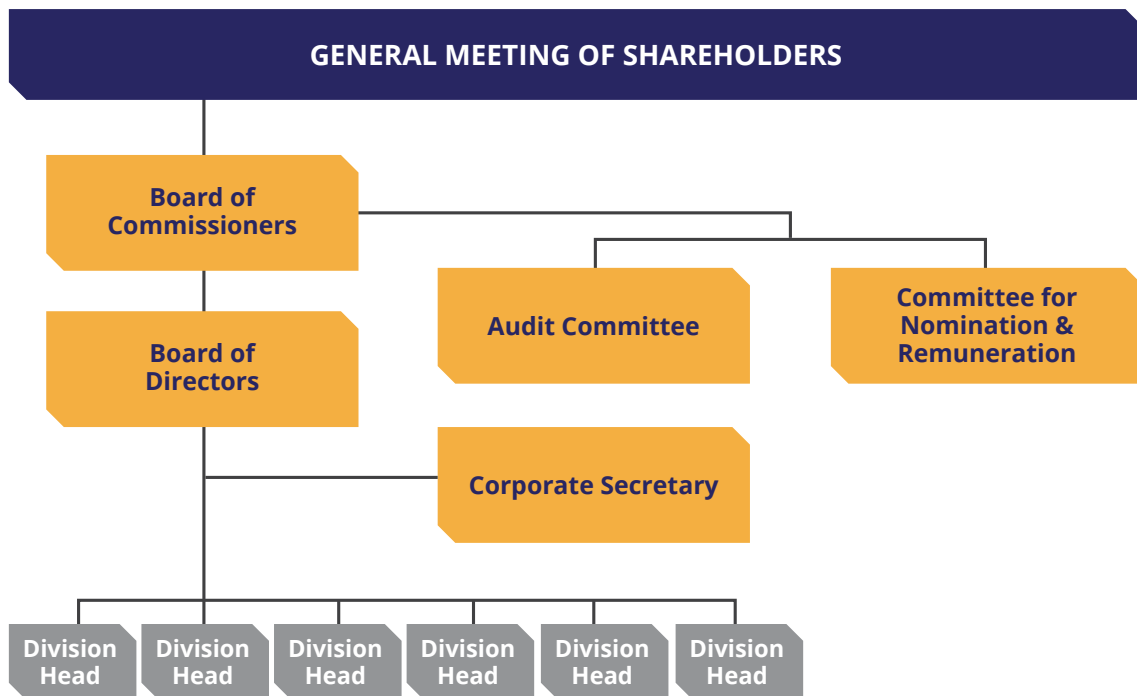
- a. The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company Organ that has authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the specified limit of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company.
- b. The Board of Commissioners is the Organ of the Company whose duty is to carry out supervision in general and/or specifically in accordance with the Articles of Association of the Company and provide advice to the Board of Directors.
- c. The Board of Directors is the Company Organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company and for

maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association.

Untuk memperkuat pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi dapat memiliki organ penunjang, dalam bentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Direksi Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi juga ditunjang oleh keberadaan Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Kepala-Kepala Divisi. Secara lengkap struktur Tata Kelola Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

To strengthen the implementation of GCG, the Board of Commissioners and Board of Directors can have supporting organs, in the form of committees under the Board of Commissioners and committees under the Board of Directors of the Company. In its implementation, the Board of Commissioners and the Board of Directors are also supported by the presence of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Division Heads. The complete structure of Corporate Governance can be seen in the chart below:



# Rapat Umum Pemegang Saham

## General meeting of Shareholders (GMS)

Perseroan memiliki dua jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan selambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir. Kedua Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB), yang bersifat kondisional, artinya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Landasan pelaksanaan RUPS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014) juncto POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.

Pada tahun 2019 Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPST dan 2 (dua) kali RUPSLB sebagai berikut:

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019

Pada 24 April 2019, IBF telah mengadakan RUPS Tahunan yang telah dituangkan dalam akta notaris No. No. 00266/2.133/AU.1/09/1152-2/1/III/2019 dengan agenda dan hasil sebagai berikut :

The Company has two types of General Meeting of Shareholders (GMS), consisting of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held the latest six months after the financial year ended. Second is another General Meeting of Shareholders or called the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM), which is conditional, meaning that it can be held at any time based on needs.

The foundation of the implementation of the GMS is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies (POJK 32/2014) juncto POJK No. 10/POJK.04/2017 concerning changes to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014.

In 2019, the Company held 1 (one) AGMS and 2 (two) EGMS as follows:

### Annual General Meeting of Shareholders in 2019

On April 24, 2019, the IBF held Annual GMS, as set forth in notarial deed No. 00266/2.133/AU.1/09/1152-2/1/III/2019 with the following agenda and results:

No	Agenda	Keputusan Rapat Meeting Decision	
1	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.</p> <p>Approval on the Company's Annual Report 2018, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioner Supervisory Report, and Ratification of the Company's Financial Statements which ended on 31 December 2018.</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00266/2.133/AU.1/09/1152-2/1/III/2019, tanggal 29 Maret 2018</p>	<p>To approve the Annual Report submitted by the Board of Directors explaining condition and course of the Company during the Fiscal Year 2018, including the Company's Activity report, Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2018 and ratified Financial Statements of the Company ending on December 31, 2018 which have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Partners with opinions without modification with paragraphs emphasizing a matter as stated in Report No. 00266/2,133/AU.1/09/1152-2/1/III/2019, March 29, 2018</p>
2	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018</p> <p>Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2018 fiscal year</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengesahkan Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp166.073.761.626,- (seratus enam puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam);</li> <li>2. Menetapkan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan;</li> <li>3. Menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approve and ratify the Company's Net Loss for Fiscal Year 2018 amounting to Rp 166,073,761,626 (one hundred sixty six billion seven hundred sixty one thousand six hundred twenty six);</li> <li>2. To determine not to distribute dividends to the Company's Shareholders as referred to in Article 71 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies; and;</li> <li>3. To determine not to set aside reserve funds as referred to in Article 70 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies.</li> </ol>
3	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019</p> <p>Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019</p>	<p>Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, Menetapkan honorarium KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan Menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.</p>	<p>Approve to authorize the Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee to Appoint a Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2019, determine the honorarium of the KAP and other requirements for its appointment, and Appoint a Substitute KAP in the case of the appointed KAP, because any cause cannot complete the audit task of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019</p>

No	Agenda	Keputusan Rapat Meeting Decision	
4	<p>Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019</p> <p>Determination of Salary and Other Benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Company for 2019</p>	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi</p>	<p>Grant authority and attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine Salaries, Fees or Honorarium, and other benefits for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in 2019 by considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee</p>
5	<p>Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD")</p> <p>Report on the use of proceeds from the Company's Limited Public Offering in the context of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights to the Company's shareholders ("PMHMETD")</p>	<p>Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD").</p>	<p>To approve and accept the Report on the realization of the use of funds resulting from the Company's Limited Public Offering in the context of Capital Increase by giving Pre-emptive Rights to the Company's shareholders ("PMHMETD").</p>

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 April 2019

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 24 April 2019, bertempat di Auditorium 5<sup>th</sup> Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara dengan agenda dan hasil sebagai berikut:

## Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 24, 2019

Extraordinary GMS was held on April 24, 2019, at 5th Floor Auditorium, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, North Jakarta with agenda and results, as follows:



No	Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Changes in the composition of the Company's Management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengangkat kembali Saudara Petrus Halim sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan RUPS LB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</li> <li>2. Mengangkat Saudara Mulyadi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit &amp; proper test</i>) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</li> <li>3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS LB terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan atas perubahan susunan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap calon Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reappoint Mr. Petrus Halim as Commissioner of the Company for a period from appointment date as stipulated in EGMS until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in the 5th year after the date of the appointment concerned, that is, at the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for financial year 2023 held in 2024, but without reducing rights of the General Meeting of Shareholders to administer incidental dismissal.</li> <li>2. To appoint Mr. Mulyadi as Director of the Company as of the date of obtaining approval from the Financial Services Authority on the fit &amp; proper test with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in the 5th year after the date of the appointment. concerned, i.e. at the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the 2023 financial year held in 2024, but without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the relevant party at any time.</li> <li>3. To grant power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decision of the General Meeting of Shareholders regarding this Agenda in accordance with the prevailing laws and regulations, including to state in a separate Notary Deed and notify of changes in the composition of the Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia against prospective Commissioners of the Company in accordance with prevailing regulations.</li> </ol>

No	Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	
2	<p>Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pengembalian Izin Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Perseroan.</p> <p>Amendment to Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose and Objectives, as well as the Company's Business Activities as a form of adjustment to the return of Sharia Business Unit Licenses conducted by the Company</p>	<p>Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan akibat Penyesuaian terhadap Pengembalian Izin Unit Usaha Syariah Perseroan.</p>	<p>Approved to amend the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives, as well as the Company's Business Activities due to Adjustments to the Return of the Sharia Business Unit License.</p>
3	<p>Persetujuan untuk menjaminkan aset perusahaan dengan nilai melebihi 50% aset bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>Approval to guarantee company assets with a value exceeding 50% of the Company's net assets, in the context of obtaining funding for operations and supporting the Company's main business activities</p>	<p>Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk menjaminkan Aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% Aset Bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan utama Perseroan, dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan <i>non bank</i> dan Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan penjaminan aset sepanjang diperlukan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Approve the actions taken by the Company's Board of Directors to guarantee the Company's Assets with a value exceeding 50% of the Company's Net Assets, in the context of obtaining funding for operations and supporting the Company's main activities, from banking institutions and non-bank financial institutions and the public. In this regard, granting power and authority to the Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners to take all necessary actions to carry out the guarantee of assets as long as necessary by taking into account the prevailing laws and regulations.</p>

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Desember 2019

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2019, bertempat di Auditorium 5<sup>th</sup> Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara dengan agenda dan hasil sebagai berikut:

## Extraordinary General Meeting of Shareholders on 17 December 2019

Extraordinary GMS was held on December 17, 2019, at 5th Floor Auditorium, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, North Jakarta with the following agenda and results:

No	Agenda	Keputusan Rapat Meeting Decision	
1	Perubahan Susunan Changes in the Company's Management composition	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan pengunduran diri dan memberhentikan Saudara Erry Sulistio selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS yang menyetujuinya dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.</li> <li>2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accepted the resignation request and dismissed Mr. Erry Sulistio as the Commissioner of the Company as of the closing date of the GMS, which agreed with thank you for the contribution of energy and thought given while serving as the Company's Commissioner.</li> <li>2. Giving power and authority to the Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution of the GMS related to this Agenda in accordance with prevailing laws and regulations, including to declare in a separate Notary Deed and notify the changes in the composition of the Board of Commissioners to the ministry Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</li> </ol>
2	Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar tentang Tempat Kedudukan Perseroan Amendment to Article 1 paragraph 1 of the Articles of Association concerning the Company's domicile	Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tempat Kedudukan Perseroan	Approved to amend the provisions of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Company's domicile
3	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka Penyesuaian POJK No. 35 tahun 2018 Amendment to Article 3 of the Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in the context of Adjustment of POJK No. 35 of 2018	Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan	Agree to amend the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives, as well as the Company's Business Activities

# Dewan Komisaris

## Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Dewan Komisaris secara kolektif melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi terkait rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dewan Komisaris juga memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tersebut sepanjang Dewan Komisaris setuju dengan isi materi laporan tahunan.

Dewan Komisaris secara terus-menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan melalui RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan menyetujui *business plan* perusahaan yang disusun oleh Direksi setiap tahunnya.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya, Perseroan telah mensahkan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Intan

Board of Commissioners is responsible to the GMS. The Board of Commissioners collegially supervises management of the Company done by the Board of Directors and provides advice regarding the Board of Directors' policies related to the Company's development plan, the Company's annual work plan and budget, the implementation of the Articles of Association and GMS decisions, as well as all prevailing laws and other relevant regulations.

Board of Commissioners also monitors and evaluates GCG implementation examines and reviews the annual report prepared by the Board of Directors, and signs the report as long as the Board of Commissioners agrees with contents of the annual report.

Board of Commissioners continuously monitors the effectiveness of the company's policies, performance and decision-making process by the Directors, including implementing strategies to meet the expectations of shareholders and other stakeholders. The results of supervision are accompanied by a review and opinion of the Board of Commissioners submitted through the GMS as part of the Directors performance evaluation. The Board of Commissioners also evaluates and approves the company's business plan prepared by the Board of Directors every year.

### Board of Commissioners Work Guideline (Board Charter)

In order to support the implementation of Board of Commissioners' duties, responsibilities and authority, in carrying out their roles, the Company has approved the PT Intan Baruprana Finance Tbk Board of Directors and Board of Commissioners

Baruparana Finance Tbk pada 05 April 2019. Pengesahan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris, berisikan :

1. Keanggotaan Dewan Komisaris;
2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
3. Pengangkatan dan masa jabatan Dewan Komisaris;
4. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris;
5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris;
6. Penggantian anggota Dewan Komisaris;
7. Ketentuan tambahan;
8. Persyaratan anggota Dewan Komisaris;
9. Komisaris Independen;
10. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
11. Tugas Dewan Komisaris;
12. Tanggung jawab Dewan Komisaris;
13. Wewenang Dewan Komisaris;
14. Benturan Kepentingan
15. Hak Dewan Komisaris;
16. Kewajiban Dewan Komisaris;
17. Rapat Dewan Komisaris;

## Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 3 (tiga) orang, dimana satu diantaranya merupakan Komisaris Independen, sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Work Guideline on April 5, 2019. Ratification on the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines was signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Work Guidelines contents are including:

1. Membership of Board of Commissioners;
2. Concurrent Position of Board of Commissioners;
3. Appointment and terms of Board of Commissioners;
4. Resignation of Board of Commissioners members;
5. Dismissal of Board of Commissioners members;
6. Replacement of Board of Commissioners members;
7. Additional provisions;
8. Requirements for Board of Commissioners members;
9. Independent Commissioner;
10. Board of Commissioners Ethics Position;
11. Duties of the Board of Commissioners;
12. Responsibilities of the Board of Commissioners;
13. Authority of the Board of Commissioners;
14. Conflict of Interest
15. Rights of the Board of Commissioners;
16. Obligations of the Board of Commissioners;
17. Board of Commissioners Meeting;

## Number and Composition of the Board of Commissioners

There are 3 (three) members of the Company's Board of Commissioners, one of whom is an Independent Commissioner, so that the composition of the Company's Board of Commissioners is in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pada tahun 2019, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

In 2019, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

### Komposisi Dewan Komisaris Per 31 Desember 2019

Board of Commissioners Composition as of 31 December 2019

Nama Nama	Jabatan Jabatan
Willy Rumondor	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner
Petrus Halim	Komisaris / Commissioner
Erry Sulistio*	Komisaris/ Commissioner

\*Mengundurkan diri 6 November 2019

\*Resigned on 9 November 2019

Pada 6 November 2019, Bpk Erry Sulistio mengajukan surat pengunduran diri sebagai Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri beliau melalui RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019.

On November 9, 2019, Mr. Erry Sulistio submitted resignation letter as a Commissioner. With regards to this matter, the Company has accepted his resignation request through the Company's EGMS held on December 17, 2019.

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris berperan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi;
2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan semua pihak;
3. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

### Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

In general, the Board of Commissioners' role is to supervise and provide advice to the Board of Directors. Roles and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Supervise and be responsible for supervising the management policies, the management process in general, both regarding the Company and the Company's business, as well as providing advice to the Board of Directors;
2. Supervise Board of Directors in maintaining balance of all parties;
3. Prepare Board of Commissioners activity report as part of Good Corporate Governance Implementation Report;

4. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
  6. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
  7. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian;
  8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan membentuk komite lainnya;
  9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
4. Monitor effectiveness of the Good Corporate Governance implementation;
  5. Ensure that the Board of Directors has followed up the audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, the results of OJK supervision and/or the results of supervision of other authorities;
  6. Under certain conditions, the Board of Commissioners shall hold an annual GMS and other GMS in accordance with their authority as stipulated in the legislation and articles of association;
  7. The Board of Commissioners members shall carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence;
  8. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must form an Audit Committee and form another committee;
  9. The Board of Commissioners must evaluate the performance of the committee that helps carry out its duties and responsibilities at the end of the fiscal year.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;

Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally liable for the Company's losses caused by errors or negligence of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties;

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 10, apabila dapat membuktikan bahwa :

Board of Commissioners members will be accounted for the Company's losses as referred to in poin 10, if they can prove that:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad
1. The loss not caused by an error or omission;
  2. has carried out arrangements in good faith,

- baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sebagai bentuk tanggung jawab, Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk membahas persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan, mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit yang dilaksanakan oleh Komite Audit. Rapat diadakan untuk memastikan bahwa tujuan dan kinerja Perseroan dalam perencanaan strategis, keuangan, akuisisi, divestasi, operasi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan dapat tercapai sejalan dengan target Perseroan. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta besaran dan komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris Perseroan telah mengusulkan adanya Audit Eksternal dan perubahan dalam Komite Audit. Dewan Komisaris juga mengawasi Komite Audit dan berkoordinasi dengan audit eksternal, audit internal, dan komite audit setiap bulannya. Dewan Komisaris juga secara aktif memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan

full responsibility, and prudence for the interests, and in accordance with purpose and objectives of the Issuer or Public Company;

3. does not have a conflict of interest, either directly or indirectly for the management action which results in a loss; and
4. has taken action to prevent the loss arising or continuing.

## Implementation of Board of Commissioners Duty

As manifestation of their responsibility, the Board of Commissioners held a meeting to discuss issues related to the Company's management, evaluate the Company's performance and audit reports carried out by the Audit Committee. Meetings are held to ensure that the Company's goals and performance in strategic planning, finance, acquisition, divestment, operations, risk management, and corporate governance can be achieved in line with the Company's targets. The Board of Commissioners also discussed the proposal of prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the amount and components of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors submitted by the Nomination and Remuneration Committee.

The Company's Board of Commissioners has proposed an External Audit and changes in the Audit Committee. The Board of Commissioners also oversees the Audit Committee and coordinates with external audits, internal audits, and the audit committee every month. The Board of Commissioners also actively provides recommendations to the Board of Directors



Perseroan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja Perseroan.

## Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat dengan Direksi secara berkala paling tidak sebanyak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut :

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Willy Rumondor	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent	6	6	100 %
Petrus Halim	Komisaris Commissioners	6	6	100 %
Erry Sulistio*	Komisaris Commissioners	4	4	100 %

\*Menjabat hingga November 2019

regarding the Company's management activities to support sustainable growth and improve the Company's performance.

## Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners is required to hold a Board of Commissioners meeting at least 1 (one) time every 2 (two) months and hold meetings with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. In 2019, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings. The level of attendance of each member of the Board of Commissioners in the meeting is as follows:

\*Serving until November 2019

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

The Board of Commissioners' meeting agenda are as follows:

Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda
20 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan dan Pendanaan Feb 2019</li> <li>Business Development 2019</li> <li>Non Performing Financing (NPF)</li> <li>Task Force 2019</li> <li>Persiapan RUPS Tahunan &amp; RUPS Luar Biasa April 2019</li> </ul>
27 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance May 2019</li> <li>Non Performing Financing (NPF)</li> <li>Business Performance and Development</li> <li>Pendanaan / Funding</li> </ul>

Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda	
26 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan Agustus 2019</li> <li><i>Non Performing Financing</i> (NPF)</li> <li>Progress Pemberian Pembiayaan tahun 2019 dan Rencana Bisnis 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance in August 2019</li> <li>Non-Performing Financing (NPF)</li> <li>Progress in Financing 2019 and Business Plan 2020</li> </ul>
28 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan Oktober 2019</li> <li><i>Non Performing Financing</i> (NPF)</li> <li>Progress Bisnis 2019</li> <li><i>Business Plan</i> dan Rencana Aksi keuangan Berkelanjutan 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance as of October 2019</li> <li>Non-Performing Financing (NPF)</li> <li>Business Progress 2019</li> <li>Business Plan and Sustainable Financial Action Plan 2020</li> </ul>
04 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Due Dilligence</i> MDC dan PWC dalam rangka konversi MTN BNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Due Diligence of MDC and PWC in the context of BNI MTN conversion</li> </ul>
17 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Keuangan November 2019</li> <li><i>Non Performing Financing</i> (NPF)</li> <li>RUPSLB dan PUBEX tanggal 17 Desember 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Performance as of November 2019</li> <li>Non-Performing Financing (NPF)</li> <li>EGMS and PUBEX dated December 17, 2019</li> </ul>

### Rekomendasi Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan strategi usaha yang dijalankan Direksi dan jajarannya. Sepanjang tahun 2019, rekomendasi dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris antara lain :

- Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik
- Berupaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan pasar Perseroan
- Memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi sebaik-baiknya agar tepat penggunaannya terkait dengan efisiensi dan kecepatan.
- Seluruh rekomendasi dan nasihat tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

### Board of Commissioners' Recommendations

As part of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners can provide recommendations and advice to the Board of Directors regarding the implementation of business strategies carried out by the Directors and their staff. Throughout 2019, recommendations and advice submitted by the Board of Commissioners include:

- Implement the Good Corporate Governance (GCG) implementation appropriately
- Seek to find new opportunities in the Company's market expansion
- Utilizing the progress of technological development as well as possible so that the appropriate use is related to efficiency and speed.
- All recommendations and advice are submitted by the Board of Commissioners through Board of Commissioners and Board of Directors joint meeting.

## Pelatihan Dewan Komisaris

## Training of the Board of Commissioners

Program	Peserta Participant	Jabatan Position	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Seminar Nasional Jakarta Peluang dan Tantangan Tahun 2020 Seminar on Opportunities and Challenges in 2020	1. Willy Rumondor	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	26 November 2019	APPI
	2. Petrus Halim	Komisaris Commissioner		

### Program Orientasi Dewan Komisaris

Perseroan belum memiliki program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Namun demikian, jika terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, Perseroan memberikan informasi yang cukup terkait kegiatan usaha Perseroan dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

### Board of Commissioners Orientation Program

Perseroan belum memiliki program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Namun demikian, jika terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, Perseroan memberikan informasi yang cukup terkait kegiatan usaha Perseroan dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

## Komisaris Independen

### Independent Commissioners

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and controlling shareholders, and are free from business relationships or other relationships that can affect their ability to act independently or act solely in the interests of the Company.

Selain tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Perseroan secara umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Komisaris Independen juga mempunyai tanggung jawab khusus, yaitu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas Perseroan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengatur bahwa Perseroan minimal menempatkan 1 (satu) orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Saat ini, Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih dari 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

## Kriteria Komisaris Independen

Dalam menunjuk Komisaris Independen, Perseroan mengacu pada kriteria peraturan perundangan yang berlaku yang dalam hal ini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menetapkan kriteria Komisaris Independen, adalah sebagai berikut :

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

In addition to the duties and functions of supervision of the general operations of the Company and ensuring compliance with prevailing laws and regulations, the Independent Commissioner also has a special responsibility, namely representing the interests of the minority shareholders of the Company. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, stipulates that the Company shall at least place 1 (one) Independent Commissioner or at least 30% of the total members of the Board of Commissioners . Recently, the Company has 1 (one) Independent Commissioner or more than 30% of the total members of the Board of Commissioners.

## Independent Commissioners Criteria

In appointing an Independent Commissioner, the Company refers to the provisions of prevailing laws and regulations, in this case, the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 Regarding the Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company, which sets the criteria of an Independent Commissioner, as follows:

- Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the period next;

- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- Do not have shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;
  - Do not have any affiliations with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Issuer or Public Company; and 4. Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.

## **Pernyataan Independensi Komisaris Independen**

Komisaris Independen merupakan pihak independen yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya, serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya. Pada tanggal 15 Agustus 2018, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB untuk mengangkat Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

## **Independency Declaration of Independent Commissioners**

Independent Commissioner is an independent party chosen in accordance with his abilities and background and has fulfilled the requirements stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number: 33/POJK.04/2014 Regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company as described in the previous section. On August 15, 2018, the Company held an EGMS to appoint Willy Rumondor as President Commissioner and concurrently Independent Commissioner.

# Direksi

## Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors is the organ of the Company that is collectively in charge and responsible for managing the Company and implementing GCG at all levels of the organization. Directors are organs that are fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya, Perseroan telah mensahkan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Intan Baruprana Finance Tbk pada 05 April 2019. Pengesahan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Direksi, berisikan :

1. Keanggotaan Direksi Perseroan;
2. Rangkap Jabatan Direksi;
3. Pengangkatan dan masa jabatan anggota Direksi;
4. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan;
5. Pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi Perseroan;
6. Penggantian anggota Direksi Perseroan;
7. Persyaratan anggota Direksi Perseroan;

### Board of Directors Work Guideline (*Board Charter*)

In order to support the implementation of the duties and responsibilities, as well as the authority of the Board of Commissioners in carrying out their role, the Company has adopted the Working Guidelines of the Directors and Board of Commissioners of PT Intan Baruprana Finance Tbk. on April 5, 2019. The ratification of the Directors and Board of Commissioners Work Guidelines was signed by the Directors and the Board of Commissioners. Board of Directors' Work Guidelines contents are including:

1. Membership of Board of Directors;
2. Concurrent Position of Board of Directors;
3. Appointment and terms of Board of Directors members;
4. Resignation of Board of Directors members;
5. Termination and temporary dismissal of Board of Directors members;
6. Replacement of Board of Directors members;
7. Requirements for Board of Directors members;

8. Etika Jabatan Direksi Perseroan;
9. Tugas Direksi Perseroan
10. Tanggung jawab Direksi Perseroan;
11. Wewenang Direksi Perseroan;
12. Benturan Kepentingan;
13. Hak Direksi Perseroan
14. Kewajiban Direksi Perseroan;
15. Rapat Direksi;
16. Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

## Penunjukan Direksi

Dalam pengangkatan Direksi, kandidat Direksi dapat dinominasikan oleh pemegang saham pengendali. Komite Nominasi dan Remunerasi kemudian akan membahas profil dan kualifikasi masing-masing kandidat dalam rapat nominasi. Kandidat terpilih kemudian akan diangkat dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan, Direksi diangkat berdasarkan kualifikasi mereka sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

## Jumlah dan Komposisi Direktur

Pada periode tahun 2019, jumlah Direksi Perseroan adalah 4 (empat) orang dengan komposisi sebagai berikut:

8. Board of Directors members Position Ethics;
9. Board of Directors Duties;
10. Responsibilities of Board of Directors;
11. Authority of the Board of Directors;
12. Conflict of Interest;
13. Rights of Board of Directors
14. Obligations of Board of Directors;
15. Board of Directors Meeting;
16. Board of Directors and Board of Commissioners Joint Meetings

## Board of Directors Appointment

In appointing the Board of Directors, the Board of Directors candidates can be nominated by the controlling shareholder. Nomination and Remuneration Committee will further discuss the profile and qualifications of each candidate in the nomination meeting. The elected candidates will be appointed with the approval of the General Meeting of Shareholders. In order to meet the needs of the Company, Board of Directors are appointed based on their qualifications in accordance with the requirements set by the Financial Services Authority as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

## Number and Composition of Directors

In 2019 period, number of the Company's Board of Directors consisted of 4 (four) people with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama	President Director
Alexander Reyza	Direktur	Director
Kurniawan Saktiaji	Direktur	Director
Mulyadi	Direktur	Director

## Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi berperan untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan orientasi kepentingan terbaik perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
2. Direksi Perseroan dapat membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Dalam hal pembentukan komite, maka Direksi Perseroan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
4. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan prinsip-prinsip Manajemen Risiko dalam setiap kegiatan operasional Perseroan;
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

## Scope of Work and Responsibilities of Directors

In general, the Board of Directors has a role in managing the company's operations in the best interests of the company. The scope of work and responsibilities of the Directors are set out as follows:

1. To carry out and be responsible for the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company stipulated in the articles of association;
2. The Company's Directors can form a committee in order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities;
3. In the case of forming a committee, the Company's Directors must evaluate the performance of the committee at the end of the financial year;
4. Implement Good Corporate Governance and Risk Management Principles in each of the Company's operational activities;
5. Following up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, the results of OJK supervision and/or the results of supervision of other authorities.



## Tanggung Jawab Direksi Perseroan

1. Setiap anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya;
2. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas, apabila dapat membuktikan bahwa :
  - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

Setiap anggota Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

### 1. Direktur Utama

- a. Memimpin Perseroan dengan memilih, menentukan dan memutuskan, peraturan serta kebijakan tertinggi yang akan diterapkan dalam tubuh Perseroan
- b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Perseroan dengan membawahi Direktorat Keuangan, Direktorat Bisnis, Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta menjaga kondisi keuangan Perseroan

## Responsibilities of The Board of Directors of The Company

1. Each member of the Company's Board of Directors is jointly and severally liable for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Company's Board of Directors in carrying out their duties;
2. Members of the Company's Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses as referred to in point 1 (one) above, if they can prove that:
  - the loss is not due to an error or omission;
  - has conducted arrangements in good faith, full responsibility and prudence for the interests, and in accordance with the aims and objectives of the Issuer or Public Company;
  - does not have a conflict of interest, either directly or indirectly for the management action which results in a loss; and

Each member of the Board of Directors has the following responsibilities:

### 1. President Director

- a. Lead the Company by selecting, determining and deciding, the highest regulations and policies that will be applied in the body of the Company
- b. Responsible for leading and running the Company in charge of the Finance Directorate, Business Directorate, Risk Management and Compliance Directorate and maintaining the financial condition of the Company.

- c. Bertanggung jawab atas kinerja Perseroan dengan mengawasi pekerjaan karyawan
- d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan Perseroan.
- e. Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam hubungannya dengan dunia luar Perseroan.
- f. Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi Perseroan.
- g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan Perseroan.
- h. Menyetujui anggaran tahunan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang saham

## 2. Direktur Keuangan

- a. Menjalankan keuangan Perseroan secara optimal dan menjawab isu-isu akuntansi yang ada dalam Perseroan;
- b. Memimpin kinerja keuangan baik dalam analisis audit pelaporan dan penggunaan dana yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
- c. Membuat perencanaan keuangan (financial projection) Perseroan dengan mempertimbangkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundangan terkait keuangan lainnya yang berlaku;
- d. Mengelola keuangan tidak hanya untuk proses operasional, namun juga untuk meningkatkan kegiatan usaha Perseroan serta perencanaan yang akan dilakukan kedepannya agar Perseroan bisa semakin tumbuh dan berkembang;
- e. Mengelola cashflow Perseroan sehingga kebutuhan operasional

- c. Responsible for the Company's performance by overseeing the work of employees
- d. Plan and develop sources of income and expenditure of the Company's wealth.
- e. Acting as a representative of the Company in relation to the outside world of the Company.
- f. Establish strategies to achieve the Company's vision and mission.
- g. Coordinate and supervise all activities of the Company.
- h. Approved the Company's annual budget and reported it to shareholders

## 2. Finance Director

- a. Running the Company's finances optimally and answering accounting issues in the Company;
- b. Leading financial performance both in the analysis of reporting audits and the use of funds owned by the Company in accordance with applicable provisions in the Company and other applicable laws and regulations;
- c. Prepare financial planning (financial projection) of the Company by considering the provisions of the Financial Services Authority and other relevant financial laws;
- d. Managing finance not only for operational processes, but also to increase the Company's business activities as well as future planning so that the Company can grow and develop;
- e. Manage the Company's cash flow so that the operational needs of the

- Perseroan tidak terganggu;
- f. Mencari sumber pendanaan untuk mengembangkan bisnis Perseroan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan;
  - g. Membuat perencanaan jangka panjang dengan memperhitungkan penilaian waktu dari uang (*time value of money*);
  - h. Memastikan bahwa laporan-laporan rutin terkait dengan keuangan Perseroan telah dibuat dengan benar dan disampaikan tepat waktu.

### 3. Direktur Bisnis

- a. Mencapai target penjualan yang ditetapkan perusahaan.
  - i. Menyusun Strategy Penjualan
  - ii. Mempersiapkan Budget tahunan.
  - iii. Mendistribusikan Sales Target
  - iv. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana kerja dan Budget.
  - v. Menjajaki peluang bisnis baru (*Research & Development*).
- b. Menjaga kualitas portfolio pembiayaan sesuai target yang ditetapkan.
- c. Membangun & menjaga hubungan baik dengan prospek maupun *existing customer* IBF.
- d. Melakukan *Coaching, Counseling, Mentoring, Motivating* dan Kaderisasi anggota Team.
- e. Melakukan analisa proses penjualan, prosedur dan mengembangkan system dan prosedur.
- f. Merepresentasikan perusahaan untuk berbagai kegiatan internal dan external yang berhubungan dengan penjualan.
- g. Sebagai Anggota Credit Committee
  - i. Memberikan rekomendasi atas proposal dan memo yang terkait

- Company are not disrupted;
- f. Looking for funding sources to develop the Company's business both from banking and non-banking institutions;
  - g. Make long-term planning by taking into account the time value of money (*time value of money*);
  - h. Ensure that regular reports related to the Company's finances have been made correctly and delivered on time.

### 3. Business Director

- a. Achieve sales targets set by the company.
  - i. Develop a Sales Strategy
  - ii. Preparing an annual Budget.
  - iii. Distributing Target Sales
  - iv. Monitoring and evaluating the implementation of work plans and budgets.
  - v. Explore new business opportunities (*Research & Development*).
- b. Maintaining the quality of the financing portfolio according to the targets set.
- c. Build & maintain good relations with prospects and existing customers IBF.
- d. Conduct *Coaching, Counseling, Mentoring, Motivating* and Team member Cadre.
- e. Analyze sales processes, procedures and develop systems and procedures.
- f. Representing the company for various internal and external activities related to sales.
- g. As a Credit Committee Member
  - i. Providing recommendations for proposals and memos related to financing proposals

- dengan proposal pembiayaan
- ii. Menandatangani dokumen penawaran pembiayaan serta kontrak/ perjanjian pembiayaan sesuai kuasa yang diberikan.

#### 4. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan

- a. Membawahkan fungsi kepatuhan yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Membawahi fungsi manajemen risiko dan administrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko perusahaan yang merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan
- c. Membawahi fungsi Risk Review yang berfungsi untuk memastikan adanya kajian risiko yang independen atas kegiatan usaha perusahaan sehingga kualitas aktiva perusahaan dapat terjaga dengan baik.
- d. Membawahi fungsi Special Asset Managemet yang berfungsi untuk memastikan bahwa Piutang Pembiayaan Bermasalah perusahaan dapat ditangani dan dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat menjaga rasio piutang pembiayaan bermasalah.
- e. Membawahi fungsi hukum dan litigasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa

- ii. Signing financing offer documents and financing contracts/ agreements in accordance with the power granted.

#### 4. Risk Management and Compliance Director

- a. Supervision of compliance functions that function to ensure that policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company in accordance with statutory regulations
- b. Supervises the functions of risk management and administration which function to ensure that the application of corporate risk management which is a set of procedures and methodologies used to identify, measure, monitor and control risks arising from the company's business activities can be carried out properly according to the rules
- c. Supervises the Risk Review function which functions to ensure an independent risk assessment of the company's business activities so that the quality of the company's assets can be maintained well.
- d. In charge of the Special Assets Hanagemet function that serves to ensure that the Troubled Credit Receivables company can be handled and corrective action in accordance with applicable regulations in order to maintain the ratio of non-performing financing receivables.
- e. Supervises the legal and litigation functions which function to ensure that the legal risks of the company can be properly guarded and also to ensure

risiko hukum perusahaan dapat dijaga dengan baik dan juga memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan dapat memperoleh hak-haknya sebagai kreditur melalui jalur hukum.

that in carrying out its business activities the company can obtain its rights as a creditor through legal channels.

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib diadakan secara berkala paling kurang sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selama tahun 2019, frekuensi rapat dan agenda rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Board of Directors Meeting Frequency and Attendance Level

Board of Directors meetings refer to the Company's Articles of Association and Financial Service Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners in Issuers or Public Companies that shall be organized at least 1 (once) in every month. Throughout 2019, the meeting frequency and agenda are presented in table below:

No	Nama Name	Jabatan Position		Rapat Komisaris dan Direksi BoC and BoD Meetings	
				Jumlah Total	% Kehadiran % Attendance
1	Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama	President Director	12/12	100,00%
2	Alexander Reyza	Direktur	Director	12/12	100,00%
3	Kurniawan Saktiaji	Direktur	Director	12/12	100,00%
4	Mulyadi*	Direktur	Director	4/12	58,33 %

\*menjabat sejak bulan September 2019

\* Serving since September 2019

Tanggal Date	Agenda	
15 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan <i>Business Plan</i> tahun 2020</li> <li>Rencana penurunan NPF Perseroan</li> <li><i>Recovery</i> IMBT</li> <li>Pemberitahuan kepada MUI terkait penutupan UUS</li> <li>Surat keputusan OJK terkait dengan pencabutan UUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion on Business Plan 2020</li> <li>Plans to reduce the Company's NPF</li> <li>IMBT recovery</li> <li>Notification to MUI related to the closure of UUS</li> <li>OJK Decree related to revocation of UUS</li> </ul>
11 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Januari 2019</li> <li>Ucapan terimakasih kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS)</li> <li>Hal hal lainnya terkait dengan Kepatuhan Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of January 2019</li> <li>Farewell to the Sharia Supervisory Board (DPS)</li> <li>Other matters related to Company Compliance</li> </ul>

Tanggal Date	Agenda	
18 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Februari 2019</li> <li>Pembahasan dari <i>Divisi Compliance</i> terkait pemenuhan OJK</li> <li><i>Progress</i> dari pembaruan kebijakan atau <i>Policy</i> Perusahaan</li> <li>Upaya-upaya penurunan NPF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of February 2019</li> <li>Discussion from the Compliance Division regarding OJK compliance</li> <li>Progress from policy updates or Company Policy</li> <li>Initiatives to reduce NPF</li> </ul>
22 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Maret 2019</li> <li>Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan</li> <li><i>Progress</i> Pendanaan 2019</li> <li><i>Progress</i> perbaikan NPF</li> <li>Pelaksanaan pelaporan SLIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of March 2019</li> <li>Preparation for the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of the Company</li> <li>Funding Progress 2019</li> <li>NPF improvement progress</li> <li>SLIK reporting</li> </ul>
15 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan April 2019</li> <li>Petugas pengelola SLIK</li> <li>Upaya pendanaan dari calon Investor</li> <li>Pembahasan atas pembaruan kebijakan atau <i>Policy</i> Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of April 2019</li> <li>SLIK management officer</li> <li>Funding efforts from potential investors</li> <li>Discussion of policy updates or Company Policy</li> </ul>
11 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Mei 2019</li> <li>Pembahasan terkait MESOP</li> <li>Pembahasan terkait PSAK 71</li> <li>Penawaran Konversi terhadap Kreditur Separatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of May 2019</li> <li>Discussion related to MESOP</li> <li>Discussion regarding PSAK 71</li> <li>Conversion Offer for Separatist Creditors</li> </ul>
09 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Juni 2019</li> <li>Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</li> <li>Hal-hal lain terkait dengan Kepatuhan Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of June 2019</li> <li>Financial Information Service System (SLIK)</li> <li>Other matters related to Company Compliance</li> </ul>
30 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Juli 2019</li> <li>Laporan hasil KPM (<i>Key Performance Measurement</i>) bulan Juli 2019</li> <li>Penyusunan Rencana Bisnis Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020</li> <li>Penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan tahun 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of June 2019</li> <li>KPM (Key Performance Measurement) results report for July 2019</li> <li>Compilation of the Company's Annual Business Plan for the fiscal year 2020</li> <li>Development of a sustainable financial action plan for 2020</li> </ul>
23 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Agustus 2019</li> <li>Pembahasan rencana konversi</li> <li><i>Progress</i> perbaikan NPF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of August 2019</li> <li>Discussion of conversion plans</li> <li>NPF improvement progress</li> </ul>
24 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan September 2019</li> <li>Rencana Audit dan <i>Due Dilligence</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Discussion of Financial Performance as of September 2019</i></li> <li><i>Audit Plan and Due Diligence</i></li> </ul>

Tanggal Date	Agenda	
06 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan Oktober 2019</li> <li>Persiapan RUPS Luar Biasa bulan Desember 2019</li> <li>Persiapan Public Expose akhir tahun 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of October 2019</li> <li>Preparation for Extraordinary General Meeting of Shareholders in December 2019</li> <li>Public Expose preparation at the end of 2019</li> </ul>
05 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Kinerja Keuangan di bulan November 2019</li> <li>Proyeksi laporan keuangan Perseroan pada akhir tahun 2019</li> <li>Progress perbaikan NPF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Financial Performance as of November 2019</li> <li>Projection of the Company's financial statements at the end of 2019</li> <li>NPF improvement progress</li> </ul>

## Program Pelatihan Direksi

Direksi selalu melakukan peningkatan kompetensi, seperti diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pada tahun 2019 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan, yaitu :

## Board of Directors Training Program

Board of Directors always enhances their competence, as stipulated in Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.05/2013 concerning Fit and Proper Tests for the Main Parties in Finance Companies and Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Tests for the Main Parties of Financial Services Institutions. In 2018 members of the Board of Directors have participated in training and development activities, as follows:

Program		Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Sosialisasi Penerapan dan Pelaporan Data Registri Aset	Dissemination of the Implementation and Reporting of Asset Registry Data	Alexander Reyza (Direktur)	09 Januari 2019	APPI
Peresmian Sistem Registry Asset dan Pemaparan pokok-pokok POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	The Launching of Asset Registry System and Presentation of POJK 35/POJK.05/2018 points concerning Financing Company Businesses	Alexander Reyza (Direktur)	25 Januari 2019	APPI & OJK

Program		Peserta Participants	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Sertifikasi Ahli Pembiayaan	Financing Expert Certification	1. Kurniawan Saktiaji (Direktur) 2. Mulyadi	28 Mei 2019	PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia
Sertifikasi Manajemen Risiko	Risk Management Certification	Mulyadi (Direktur)	15 Agustus 2019	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Pembiayaan	Dissemination of the Implementation of Sustainable Finance for Financing Companies	Kurniawan Saktiaji (Direktur)	24 September 2019	APPI
Pertemuan anggota dan Apresiasi APPI	APPI member meeting and Appreciation	1. Carolina Dina Rusdiana (Direktur Utama) 2. Mulyadi (Direktur)	06 November 2019	APPI
Persiapan dalam Menghadapi Turbulensi Ekonomi Global pada Masa Kabinet Indonesia Maju	Preparations in Facing Global Economic Turbulence in the Future of the Indonesian Cabinet	Alexander Reyza (Direktur)	12 November 2019	ICSA dan Bursa Efek Indonesia
Seminar Nasional Jakarta Peluang dan Tantangan Tahun 2020	Jakarta National Seminar on Opportunities and Challenges in 2020	1. Carolina Dina Rusdiana (Direktur Utama) 2. Kurniawan Saktiaji (Direktur)	26 November 2019	APPI
Indonesia Mining Outlook 2020	Indonesia Mining Outlook 2020	Kurniawan Saktiaji (Direktur)	11 Desember 2019	Majalah Tambang

## Program Orientasi Direksi

Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan *mentoring* terhadap anggota Direksi yang baru bergabung yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya yang telah bergabung lebih dulu.

## Board of Directors Orientation Program

The Company has a policy to mentor new members of the Board of Directors who have joined together with other members of the Board of Directors who have joined first.



## Kebijakan Suksesi Direksi

Perseroan melakukan program pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Dalam menominasikan anggota Direksi, Perseroan mendahulukan pihak internal terlebih dahulu. Perseroan juga memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang salah satu tugasnya adalah menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Prosedur Nominasi sebagaimana dimaksud dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan, serta peraturan perundang-undangan.

Program suksesi Direksi Perseroan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan. Program suksesi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Program pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan di internal Perseroan atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal; dan
2. Pendelegasian wewenang.

## Board of Directors Succession Policy

The Company provides employee development programs on an ongoing basis. In the nomination process for the Board of Directors members, the Company prioritizes internal candidates. The Company also has established a Nomination and Remuneration Committee whose job is to examine and propose succession planning for members of the Directors and/or Board of Commissioners. The Nomination Procedure referred to is carried out transparently and in accordance with the conditions and needs of the Company, as well as laws and regulations.

The Company's Board of Directors succession program is carried out continuously in accordance with the needs and business development of the Company. The succession program is carried out in the following mechanisms:

1. Education and training programs, both conducted internally within the Company and provided by external parties; and
2. Delegation of authority.

# Assesmen Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Assessment on Board of Commissioners and Board of Directors

## Prosedur Pelaksanaan Assesment atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

*Assessment* kinerja Dewan Komisaris dan Direksi masuk ke dalam agenda rapat Tim Remunerasi yang membahas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta kemudian menentukan besaran remunerasi yang sesuai dengan kinerja pada periode yang bersangkutan. *Assessment* kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara langsung, serta oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sementara itu, kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

## Kriteria Assesment atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini adalah kriteria *Assessment* kinerja Dewan Komisaris:

1. Implementasi GCG
2. Keselarasan kinerja terhadap visi dan misi
3. Perbandingan antara target dan pencapaian aktual.

Berikut adalah kriteria *Assessment* kinerja Direksi:

1. Implementasi GCG
2. Kinerja secara keuangan, operasional, dan aspek-aspek lainnya yang berperan

## Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment Procedure

The performance evaluation of the Board of Commissioners and Directors is included in the agenda of the Remuneration Team meeting which discusses the performance of the Board of Commissioners and Directors and then determines the amount of remuneration in accordance with the performance of the relevant period. The performance evaluation of the Directors is carried out by the Board of Commissioners directly, as well as by shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the performance of the Board of Commissioners is evaluated by shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders.

## Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment Criteria

The Board of Commissioners Performance Assessment criteria are as follows:

1. GCG implementation
2. Alignment of performance with vision and mission
3. Comparison between targets and actual achievements.

Board of Directors performance evaluation criteria are as follows:

1. GCG implementation
2. Financial, operational and other aspects that play an important role in the

- penting bagi keberlanjutan Perseroan
3. Perbandingan antara target dan pencapaian aktual
  4. Keselarasan kinerja terhadap visi dan misi
  5. Strategi dan inovasi
  6. Pencapaian manajemen dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham
  7. Kinerja masing-masing Direktur secara individu

## Pihak Yang Melakukan Assesment

*Assesment* terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi bersifat internal atau *self-Assesment*. Tidak ada pihak independen yang ditunjuk untuk melakukan *Assesment* kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019.

Company's sustainability

3. Comparison between targets and actual achievements
4. Alignment of performance with vision and mission
5. Strategy and innovation
6. Management's achievement in increasing value for shareholders
7. The performance of each Director individually

## The Assessor

Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment is done internally or through self-assessment. There is no independent parties appointed to perform the Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment in 2019.

# Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

## Board of Commissioners and The Board of Directors Remuneration Policy

### Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur remunerasi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi juga secara berkala mengevaluasi kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS, namun RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi.

### Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan ketentuan yang diterapkan pemegang saham, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Gaji/ Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/Insentif Kinerja

Dengan demikian, struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

### Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Procedure

Remuneration procedures are carried out in accordance with applicable laws. The Company, through the Nomination and Remuneration Committee, also periodically evaluates the policies, magnitude and structure of the remuneration. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) states that the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the GMS, but the GMS can authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors.

### Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration structure

Based on provisions implemented by shareholders, components of the Board of Commissioners' remuneration consist of:

1. Salary/Honorarium
2. Allowances
3. Facilities
4. Performance bonus/incentives

Therefore, the remuneration structure and its components for the Board of Commissioners and Directors can be provided are as follows:

### Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Remuneration Component

No	Komponen Component	Keterangan Description	
1	Honorarium Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama</li> <li>Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>President Commissioner is 45% of the salary of the President Director</li> <li>Commissioner is 90% of the honorarium of the President Commissioner</li> </ul>
2	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	1 (satu) kali honorarium	1 (one) month honorarium
3	Tantiem Tantiem	Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS	Stipulated annually based on the GMS resolutions
4	Santunan Purna Tugas Compensation of Duty	25% dari honorarium per bulan x masa jabatan	25% of the honorarium per month x tenure

### Komponen Remunerasi Direksi

The Board of Directors' Remuneration Component

No	Komponen Component	Keterangan Description	
1	Honorarium Honorarium	1 (satu) kali honorarium	1 (one) time honorarium
2	Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	1 (satu) kali honorarium	1 (one) time honorarium
3	Tantiem Tantiem	Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS	Stipulated annually according to the resolution of the GMS
4	Santunan Purna Tugas Compensation of Duty	25% dari honorarium per bulan x masa jabatan	25% of the honorarium per month x tenure

# Hubungan Afiliasi

## Affiliations

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan wajib mengungkapkan hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Shareholder	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No
Willy Rumondor	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner		√		√		√
Petrus Halim	Komisaris Commissioner		√		√		√
Erry Sulistio	Komisaris Commissioner		√		√		√

In accordance with the Financial Services Authority regulations, the Company is required to disclose the affiliations among the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders.

Affiliations among members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders include:

1. Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.
2. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
3. Affiliation between the members of the Board of Directors and the Main Shareholders and/or controllers.
4. Affiliation between members of the Board of Commissioners and other Commissioners;
5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and Major Shareholders and/or controllers.

The affiliation between the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders of the Company is explained in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation With					
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director		Pemegang Saham Pengendali Shareholder	
		Yes	No	Yes	No	Yes	No
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama President Director		√		√		√
Alexander Reyza	Direktur/ Director		√		√		√
Kurniawan Saktiaji	Direktur/ Director		√		√		√
Mulyadi	Direktur/ Director		√		√		√

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation with						Hubungan Kepengurusan Management Relation	
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Shareholder			
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Willy Rumondor	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner		√		√		√		√
Petrus Halim	Komisaris Commissioner		√		√	√			√
Erry Sulistio	Komisaris Commissioner		√		√		√		√
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama President Director		√		√		√		√
Alexander Reyza	Direktur/ Director		√		√		√		√
Kurniawan Saktiaji	Direktur/ Director		√		√		√		√
Mulyadi	Direktur/ Director		√		√		√		√

# Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

## Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

Hingga 31 Desember 2019, Perseroan belum memiliki aturan tertulis yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mempertimbangkan kompetensi kandidat dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition will encourage more objective and comprehensive decision making as the decisions will be taken by considering various points of view.

As of December 31, 2019, the Company did not have written provisions regulating diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors. In appointing members of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company considers the competence of candidates and refers to the prevailing laws and regulations.

Diversity of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

#### Board of Commissioners Composition Diversity

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Jenjang Pendidikan Level of Education		Usia Age	Pengalaman Terakhir Recent experience
Willy Rumondor	Laki-laki Male	Ekonomi Perusahaan SMEA Negeri Balikpapan (1970)	Corporate Economics of the Balikpapan City Vocational School (1970)	69	Advisor di PT INTA
Petrus Halim	Laki-laki Male	Bachelor of Science in Finance dari California State University, Fresno, Amerika Serikat (AS) (1993), Master of Business Administration in Finance dari Boston University, AS (1994)	Bachelor of Science in Finance from California State University, Fresno, United States (US) (1993), Master of Business Administration in Finance from Boston University, AS (1994)	49	Direktur Utama PT INTA dan Direktur PT INTA Trading



### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition Diversity

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Jenjang Pendidikan Level of Education		Usia Age	Pengalaman Terakhir Recent experience
Erry Sulistio	Laki-laki Male	Bachelor of Science Finance & Economics di University of Wisconsin La-Crosse, USA (1995).	Bachelor of Science Finance & Economics from University of Wisconsin La-Crosse, USA (1995).	50	Founders & CEO di PT Northcliff Indonesia dan Northcliff Capital Private Limited

### Keberagaman Komposisi Direksi

Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	Jenis Kelamin Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Level of Education		Usia Age	Pengalaman terakhir Recent experience
Carolina Dina Rusdiana	Perempuan Female	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (1985)	Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia. (1985)	57	Senior Advisor di PT Heksa Insurance and Group
Alexander Reyza	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1994)	Bachelor of Management Economics from Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1994)	49	Head of Commercial Credit Risk PT Bank Rabobank International Indonesia
Kurniawan Saktiaji	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2002)	Bachelor of Economics in Financial Management Study Program from Faculty of Economics, Indonesia (2002)	41	Sales and Marketing Division Head Perseroan.
Mulyadi	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung (1991)	Bachelor of Economics in Management Study Program from the Faculty of Economics, Universitas Lampung (1991)	52	Anggota Komite Audit di PT Intan Baruprana Finance Tbk

# Komite Audit

## Audit Committee

Komite Audit merupakan salah satu komite yang mendukung pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Di tahun 2019, Perseroan mengalami 4 (empat) kali perubahan komposisi Komite Audit, yang diawali pada 9 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 001/SKEP-DEKOM/IBF/0119 tentang Pengangkatan dan Penetapan Komite Audit, susunan dan komposisi Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	
Willy Rumondor	Ketua	Chairman
Mulyadi	Anggota	Member
Wira Sudjana Halim	Anggota	Member

Kemudian pada 23 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 005/SKEP-DEKOM/IBF/0419 tentang Pemberhentian dan Perubahan Komposisi Komite Audit, komposisi Komite Audit Perseroan terdiri dari:

Nama Name	Jabatan Position	
Willy Rumondor	Ketua	Chairman
Wira Sudjana Halim	Anggota	Member

Selanjutnya pada 17 Juli 2019 mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT

Audit Committee is one of the committees that supports Board of Commissioners' Duties implementation. Establishment of the Company's Audit Committee refers to OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Audit Committee Establishment and Duty Implementation.

In 2019, the Company experienced 4 (four) changes in terms of Audit Committee composition, which began on January 9, 2019 based on PT Intan Baruprana Finance Tbk Board of Commissioners Decree No. 001/SKEP-DEKOM/IBF/0119 concerning Appointment and Determination of the Audit Committee, the composition and composition of the Company's Audit Committee are as follows:

Next on April 23, 2019 according to PT Intan Baruprana Finance Tbk Board of Commissioners Decree No.005/SKEP-DEKOM/IBF/0419 concerning Dismissal and Changes in the Composition of the Audit Committee, the composition of the Company's Audit Committee consists of:

Intan Baruprana Finance Tbk No. 006/SKEP-DEKOM/IBF/0719 tentang Pengangkatan dan Perubahan Komposisi Komite Audit, komposisi Komite Audit Perseroan menjadi:

Intan Baruprana Finance Tbk No. 006/SKEP-DEKOM/IBF/0719 concerning Appointment and Changes in the Composition of the Audit Committee, the composition of the Company's Audit Committee becomes:

Nama Name	Jabatan Position	
Willy Rumondor	Ketua	Chairman
Wira Sudjana Halim	Anggota	Member
Sutrisno Yulianto	Anggota	Member

Yang terakhir pada 11 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Penetapan Susunan Komite Audit, komposisi Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

The last was on October 11, 2019 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019 concerning Dismissal, Appointment and Determination of the Audit Committee Composition, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	
Willy Rumondor	Ketua	Chairman
Renaldi Ariyanto	Anggota	Member
Ivan Agustinus Lingga SE, Ak	Anggota	Member

Profil singkat masing-masing anggota Komite Audit yang masih menjabat adalah sebagai berikut :

The brief profile of each member of the Audit Committee is as follows:

**1. Willy Rumondor – Ketua**

Profil Willy Rumondor dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Perseroan.

**1. Willy Rumondor – Ketua**

Willy Rumondor's profile can be seen in the Board of Commissioners profile section.

**2. Renaldi Ariyanto – Anggota**

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1960. Diangkat menjadi

**2. Renaldi Ariyanto – Anggota**

An Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1960. Appointed as a member of the

anggota Komite Audit Perseroan sejak 11 Oktober 2019 melalui surat keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. Menyelesaikan pendidikan dari Woodbury University, Los Angeles, California, USA Bachelor of Science, International Business/Management tahun 1985

Memulai karir ditahun 1996 di Max Altman Camera, Photo & Trading Co. Los Angeles, California, USA sebagai Marketing Staff tahun 1980, kemudian Ellen of California, Garment & Trading Co. Los Angeles, California, USA Inspector & Comptroller tahun 1980, dan PT Bank Niaga sejak 1985 sd 1999. Sejak tahun 2012 menjabat sebagai President Director pada PT. Bringin Srikandi Finance dan terakhir sebagai anggota Komite manajemen risiko Bank of India.

### 3. Ivan Agustinus Lingga SE, Ak – Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1975. Diangkat menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 11 Oktober 2019 melalui surat keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. Menyelesaikan pendidikan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Atmajaya Jakarta tahun 2000, dan profesi akuntan dari Universitas Indonesia tahun 2004.

Memulai karir profesional di KAP Drs RB Tanubrata & Rekan tahun 2000, Internal Audit Officer PT Smart Tbk tahun 2002, Internal Audit Asisten Manager PT Rajawali Plantation tahun 2005 hingga menjadi Manager Performance Improvement tahun 2010, sebagai Head of Internal Audit dimulai di PT Circle K Indonesia Utama

Company's Audit Committee since October 11, 2019 through the Decree of the Board of Commissioners No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. Graduated from Woodbury University, Los Angeles, California, USA Bachelor of Science, International Business/Management in 1985

Started his career in 1994 at Max Altman Camera, Photo & Trading Co. Los Angeles, California, USA as Marketing Staff in 1980, then Ellen of California, Garment & Trading Co. Los Angeles, California, USA Inspector & Comptroller in 1980, and PT Bank Niaga from 1985 to 1999. Since 2012 he was appointed as President Director at PT Bringin Srikandi Finance and the latest is member of risk management committee at Bank of India.

### 3. Ivan Agustinus Lingga SE, Ak – Anggota

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1975. Appointed as a member of the Company's Audit Committee since October 11, 2019 through the Decree of the Board of Commissioners No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. He graduated from the Faculty of Economics, Department of Accounting, Atmajaya University, Jakarta in 2000, and the accounting profession from Universitas Indonesia in 2004.

Started his professional career at KAP Drs. RB Tanubrata & Partners in 2000, Internal Audit Officer at PT Smart Tbk in 2002, Assistant Internal Manager at PT Rajawali Plantation in 2005 until appointed Manager of Performance Improvement in 2010, as Head of Internal Audit starting at PT Circle K Indonesia In 2012, PT Tirta Amarta Bottling

tahun 2012, PT Tirta Amarta Bottling Co-Manufactured tahun 2012, PT Rajakamar International Grup tahun 2014, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk tahun 2014, dan terakhir pada tahun 2017 sebagai Corporate Internal Audit (CIA) Dept Head PT Samudera Indonesia Tbk.

Co-Manufactured in 2012, PT Rajakamar International Group in 2014, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk in 2014, and most recently in 2017 as the Corporate Internal Audit (CIA) Dept. Head of PT Samudera Indonesia Tbk.

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dengan memberikan masukan dan usulan atas laporan-laporan dari Direksi, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak

The main duties of the Audit Committee are to assist the Board of Commissioners by providing input and proposals of reports from the Board of Directors, as well as providing input on matters that need the attention of the Board of Commissioners. Details description of duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. Reviewing financial information that will be released by the Company to the Public and/or the authorities including financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Provide independent opinions in the event of disagreements between management and the Accountant on the services they provide;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants based on independence, the scope of the assignment, and fees;
5. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal auditors;
6. Reviewing risk management activities carried out by the Board of Directors, if the

memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melaksanakan Rapat dengan ketentuan:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
3. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan video/ teleconference.
4. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Komite Audit berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Komite Audit.
6. Bila diperlukan, Komite Audit dapat mengundang pihak lain untuk ikut serta dalam rapat.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak.

Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;

7. Review complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company;
8. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company; and
9. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

In carrying out its duties, the Audit Committee conducts Meetings provided that:

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Notification of meetings of the Audit Committee can be done in person or by mail, electronic mail, facsimile or telephone.
3. Audit Committee meetings can be held through formal meetings or by video/ teleconference.
4. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the number of members.
5. The Audit Committee Meeting is chaired by the Chairperson of the Audit Committee. In the event that the Audit Committee is unable to attend, the meeting may be chaired by a member of the Audit Committee appointed by the Audit Committee.
6. If necessary, the Audit Committee can invite other parties to participate in the meeting.
7. The decision of the Audit Committee meeting is based on deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, decision making is carried out with the most votes mechanism.

8. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah rapat dalam point diatas harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal rapat, dan setiap anggota Komite berhak untuk mendapat salinan risalah rapat walaupun tidak hadir.

8. Each Audit Committee meeting is outlined in the minutes of the meeting, including if there are differences of opinion, which are signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.
9. Minutes of meetings in the above points shall be completed within 14 (fourteen) days from the date of the meeting, and each Committee member is entitled to obtain a copy of the minutes of the meeting even if he did not attend the meeting.

Pada tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan agenda masing-masing rapat seperti tabel dibawah ini :

In 2019, the Audit Committee held meetings with Audit Committe are presented following table:

No	Nama Name	Jabatan Position		Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings	
				Jumlah Total	% Kehadiran % Attendance
1	Willy Rumondor	Ketua	Chairman	4/4	100 %
2	Mulyadi	Anggota	Member	2/4	50 %
3	Wira Sudjana Halim	Anggota	Member	2/4	50 %
4	Sutrisno Yulianto	Anggota	Member	2/4	50 %
5	Renaldi Ariyanto	Anggota	Member	1/4	25 %
6	Ivan Agustinus Lingga	Anggota	Member	1/4	25 %

Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda	
28 Maret 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan PT Hillcon Jaya Sakti</li> <li>• Rencana Kerja Tahun 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussion of PT Hillcon Jaya Sakti</li> <li>• Work Plan 2019</li> </ul>
14 Agustus 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Audit Semester I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Results as of 1st Half of 2019</li> </ul>
05 September 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>• Mobilisasi Unit Jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goods and Services Procurement Policy</li> <li>• Mobilization of Guarantee Units</li> </ul>
04 Desember 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Plan vs Realisasi Q3 - 2019</li> <li>• Reguler &amp; Spesial Audit Q3 - 2019</li> <li>• Audit Plan 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Plan and Realization as of 3rd Quarter - 2019</li> <li>• Regular and Special Audit as of 3rd Quarter - 2019</li> <li>• Audit Plan in 2020</li> </ul>

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama periode 2019, Komite Audit telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. Melakukan *review* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Unit Audit Internal.
2. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajemen.

Beberapa rekomendasi yang di berikan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tentang pelaksanaan GCG antara lain tentang sistem pengendalian, kerahasiaan, *review* Kantor Akuntan Publik, maupun informasi yang akan dikeluarkan ke *stakeholder*.
2. Tentang pelaksanaan pekerjaan Audit Internal, antara lain tentang pengelolaan resiko, pengendalian internal, ketaatan atas peraturan, dan mengantisipasi kecurangan.

## Audit Committee Activity Implementation Report

In the 2019 period, the Audit Committee has taken measures including:

1. Reviewing the results of audits conducted by the Internal Audit Unit.
2. Reviewing the implementation of risk management activities carried out by management.

Some of the recommendations given by the Audit Committee throughout 2019 are as follows:

1. Regarding the implementation of GCG, among others, regarding the system of control, confidentiality, review of the Public Accounting Firm, as well as information that will be released to stakeholders.
2. Regarding the implementation of Internal Audit work, including among others about risk management, internal control, compliance with regulations, and anticipation of fraud.



# Komite Nominasi dan Remunerasi

## Nomination and Remuneration Committee

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014. Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418 tanggal 10 April 2018, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut :

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The Company has established a Nomination and Remuneration Committee in accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014. Through Board of Commissioners Decree No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418, April 2018, the composition of the Nomination and Remuneration Committee members is as follows:

As of December 31, 2019, the Nomination and Remuneration Committee composition is as follows:

### Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Per 31 Desember 2019

As of December 31, 2019, the Nomination and Remuneration Committee composition

Nama Name	Jabatan Position	
Willy Rumondor	Ketua	Chairman
Petrus Halim	Anggota	Member
Mohammad Qudzie	Anggota	Member

Profil singkat masing-masing anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut:

#### 1. Willy Rumondor – Ketua

Profil Willy Rumondor dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Perseroan.

#### 2. Petrus Halim – Anggota

Profil Petrus Halim dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Perseroan.

#### 3. Mohammad Qudzie – Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1968. Diangkat menjadi anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan sejak 23 Maret 2018 melalui surat keputusan Dewan Komisaris no: 005/SKEP-DEKOM/IBF/0318. Menyelesaikan

The brief profile of each member of the Nomination & Remuneration Committee is as follows:

#### 1. Willy Rumondor – Chairman

Willy Rumondor's profile can be seen in the Profile section of the Company's Board of Commissioners.

#### 2. Petrus Halim – Member

Petrus Halim's profile can be seen in the Profile section of the Company's Board of Commissioners.

#### 3. Mohammad Qudzie – Member

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1968. Appointed as a member of the Company's Nomination & Remuneration Committee since March 23, 2018 through a decision letter from the Board of Commissioners no: 005/SKEP-DEKOM/

pendidikan Sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada pada tahun 1994.

Memulai karir ditahun 1994 di PT United Tractors Indonesia sebagai Corporate Human Resource Management. Bergabung dengan PT Arsa Raya Perdana sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 sebagai Human Resources System Development. Mulai tahun 2000 sampai dengan saat ini bergabung dengan PT Intraco Penta Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Human Energy.

Dalam melaksanakan tugasnya, selama tahun 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan Rapat dengan agenda rapat sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Meetings	
			Jumlah Total	% Kehadiran % Attendance
1	Willy Rumondor	Ketua/ Chairman	3/3	100%
2	Petrus Halim	Anggota/ Member	3/3	100%
3	Mohammad Qudzie	Anggota/ Member	3/3	100%

Tanggal Rapat Date of Meetings	Agenda	
20 Maret 2019	Usulan pengangkatan Bpk. Mulyadi mejadi Direktur Perseroan	Proposed appointment of Mr. Mulyadi became the Company's Director
27 Juni 2019	Pembahasan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris Perseroan, berikut Kinerja Direksi & Dewan Komisaris.	Discussion on the Board of Directors & Board of Commissioners' Remuneration, along with the Board of Directors & Board of Commissioners Performance.
28 November 2019	Pembahasan mengenai pengunduran diri Bpk. Erry Sulistio selaku Komisaris Perseroan.	Discussion on the resignation of Mr. Erry Sulistio as Commissioner of the Company.

IBF/0318. He completed his Bachelor of Education from the Faculty of Psychology at Gajah Mada University in 1994.

Started his career in 1994 at PT United Tractors Indonesia as a Corporate Human Resource Management. Joined PT Arsa Raya Perdana from 1998 to 2000 as a Human Resources System Development. Starting from 2000 until now he joined PT Intraco Penta Tbk with his last position as Senior Vice President of Human Energy.

In carrying out its duties, during 2019 the Nomination and Remuneration Committee carries out Meetings with the meeting agenda as listed in the table below:

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait nominasi dan remunerasi untuk menyeleksi calon Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengajukan usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan saran kepada Dewan Komisaris berupa: Penetapan remunerasi agar dilaksanakan sesuai dengan performance masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris, terkait dengan implementasi GCG, kesesuaian target dan pencapaian, kinerja perusahaan dan keselarasan kerja.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Kriteria penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan, termasuk terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
2. Kondisi perekonomian dan perbandingan terhadap perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis;
3. Kontribusi dan kinerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Perseroan. Paket remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019 sebesar Rp900 juta dan Rp3,54 miliar.

## Nomination and Remuneration Committee Activity Implementation Report

The Nomination and Remuneration Committee has carried out several activities related to nomination and remuneration to select candidates for the Board of Commissioners and Directors of the Company and propose remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

In 2019, the Nomination and Remuneration Committee has provided advice to the Board of Commissioners in form of: Determination of remuneration to be carried out in accordance with the performance of each of the Directors and the Board of Commissioners, related to GCG implementation, conformity of achievements, company performance and alignment.

## Board of Commissioners and Board of Directors' Remuneration

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on GMS resolution. The criteria for determining the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

1. Have achieved the Company's financial performance, including the Company's ability to fulfill its financial obligations;
2. Economic conditions and comparisons of companies that have similar business activities;
3. Contribution and performance of Board of Directors and Board of Commissioners member for the Company. The remuneration package received by the Board of Commissioners and Directors in 2019 amounted to Rp900 million and Rp3.54 billion.

# Sekretaris Perusahaan

## Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perseroan, serta bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dan pelaku pasar modal lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika perusahaan, prinsip tata kelola, dan nilai-nilai perusahaan. Selain daripada itu, sekretaris perusahaan wajib memastikan pemenuhan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sekretaris Perusahaan dirangkap jabatan oleh Alexander Reyza (Direktur Perseroan) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.003/SKEP-DIR/IBF/0818 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2018. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas antara lain :

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia;
2. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporasi yang dilakukan Direksi maupu transaksi yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Corporate Secretary has an important role in facilitating communication between the Company's organs, and responsible on policy formulation, planning and ensuring the effectiveness and transparency of the Company's communications, institutional relations, investor relations and other capital market players while concerning corporate ethical standards and principles, governance principles, and corporate values. In addition, the corporate secretary is obliged to ensure fulfillment of company compliance with capital market regulations.

Corporate Secretary is concurrently served by Alexander Reyza (Director of the Company) in accordance with the Board of Directors Decree No.003/SKEP-DIR/IBF/0818 regarding the Appointment of the Company's Corporate Secretary dated August 20, 2018. The Corporate Secretary has duties including:

1. As a liaison between the Company and capital market regulator institutions namely OJK and the Indonesia Stock Exchange;
2. As an center of information for shareholders and all stakeholders who need important information relating to the activities and developments of the Company;
3. Provide input to the Board of Directors of the Company so that corporate actions taken by the Board of Directors can be carried out by the Company in accordance with applicable laws and regulations in the capital market, the Company's articles of association and applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia;

- Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan.

## Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2019, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal, termasuk aktif mengikuti acara sosialisasi, seminar ataupun *workshop* terkait Pasar Modal.
- Menginformasikan kepada manajemen terkait dengan ketentuan terbaru dibidang Pasar Modal.
- Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan
- Penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan unit terkait.

## Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan terus berupaya meningkatkan kompetensinya. Berikut adalah pelatihan/*workshop*/seminar yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 antara lain:

- Carry out the Company's GMS, Board of Directors and Board of Commissioners' Meetings and conduct legal Review Of The Company's Transaction documents.

## Brief Corporate Secretary Duty Implementation Report

In 2019, implementation of duty and activities carried out by the Corporate Secretary are as follows

- Following development of the Capital Market, including actively attending socialization events, seminars or workshops related to the Capital Market.
- Inform the management on the latest provisions in the Capital Market.
- Organize the Company's Annual General Meeting of Shareholders
- Organize Coordination Meeting activities for the Board of Commissioners, Directors, Committees and related units.

## Corporate Secretary Training

In order to support the implementation of its duties and responsibilities, the Corporate Secretary continues to improve his competence. Following are the training/*workshops*/seminars participated by the Corporate Secretary in 2019, including:

Judul Pelatihan/ Workshop/Seminar Title of Training/workshop/Seminar		Penyelenggara Organizer	Waktu & Tempat Time and Place
SEMINAR NASIONAL "Industri Pembiayaan di Pasar Modal"	NATIONAL SEMINAR "Financing Industry in the Capital Market"	APPI	Jakarta, 26 Juli 2018
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme: " Kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme	Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing: "Policies and procedures for implementing the AML-CTF program and the roles and responsibilities of employees in preventing and countering money laundering and/or terrorism financing.	IBF & PPATK	Jakarta 27 November 2018

# Audit Internal

## Internal Audit

Unit Audit Internal merupakan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal dan wajib dimiliki setiap perusahaan publik sesuai ketentuan dalam POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Untuk itu Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal melalui Surat Penetapan Direksi No. 043/IBF/HEGA-SK/X/19 tanggal 14 Oktober 2019. Ahmad Fahri Zein ditunjuk sebagai Internal Audit Perseroan yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

### Ahmad Fahri Zein

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1962. Menyelesaikan pendidikan dengan gelar diploma Perbankan dari Universitas Perbanas, Jakarta. Yang bersangkutan telah lulus BSMR 1-2 dan QIA tersertifikasi.

Selama 25 tahun berkarir di Bank CIMB Niaga dengan posisi terakhir sebagai Support Head - Internal Audit Jakarta.

### Keanggotaan Internal Audit

Internal Audit Membership

Unit Internal Audit Internal Audit Unit		Jumlah Personel Total Personnel
Kepala Internal Audit	Head of Internal Audit	1

### Kompetensi Auditor

Perseroan secara berkesinambungan menyertakan para auditor pada program-program sertifikasi profesi di bidang internal Audit, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi auditor.

Internal Audit Unit is a work unit that carries out the internal audit function and must be owned by every public company in accordance with the provisions of POJK No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparation of the Internal Audit Unit Charter. For this reason, the Company has formed an Internal Audit Unit through Decree of the Board of Directors No.001/IBF/HRGA-SPNP/II/17 dated February 3, 2017. Hafiz Dwi Sayadi has been appointed as Internal Audit Head and he is directly responsible to the President Director.

### Ahmad Fahri Zein

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1962. Graduated Banking diploma from Perbanas University, Jakarta. He has passed BSMR 1-2 and certified QIA.

He holds 25-years of career experience at CIMB Niaga Bank with his last position as Support Head - Internal Audit in Jakarta.

### Auditor Competency

The Company continuously includes auditors in professional certification programs in the internal audit field, both national and international. This step is part of a strategy to increase auditor knowledge and competence.

## Sertifikasi Auditor

Auditor Certification

Sertifikasi Certification	Jumlah Total	Nama Name
QIA (Qualified Internal Auditor)	1	Ahmad Fahri Zein
BSMR Level 1	1	Ahmad Fahri Zein
BSMR Level 2	1	Ahmad Fahri Zein

Selama tahun 2019, Perusahaan juga menyertakan para auditor dalam berbagai pelatihan, yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualitas audit.

In 2019, the Company also participated in auditors in various trainings, intended to improve their competencies and audit quality.

## Pedoman Kerja

Internal Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan

## Internal Audit Charter

The Company's Internal Audit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and implement an annual Internal Audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policy;
3. Examining and evaluating the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology fields and other activities;
4. Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management;
5. Prepare audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;
6. Monitor, analyze and report the implementation of the improvements that have been suggested;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Design a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out; and

- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Internal Audit mengacu kepada Piagam Audit, sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 56/POJK.04/2014, yang didalamnya memuat :

- Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
- Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;
- Wewenang Unit Audit Internal;
- Kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional;
- Persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal;
- Pertanggungjawaban Unit Audit Internal;
- Larangan perangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

## Realisasi Kegiatan Internal Audit

### Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Kegiatan audit meliputi:

- Review bisnis proses yang ada beserta risiko yang terkandung serta penyebabnya untuk memastikan aspek kepatuhan kepada kebijakan, hukum dan peraturan.
- Review pengamanan dan pemanfaatan aktiva, menilai efisiensi penggunaan sumber daya, dalam hal ini kemampuan untuk

- Perform special audit, if needed.

In carrying out its duties and responsibilities Internal Audit refers to the Audit Charter, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation no 56/POJK.04/2014, which includes:

- Structure and position of the Internal Audit Unit;
- Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit;
- Authority of the Internal Audit Unit;
- The Internal Audit Unit's code of ethics refers to the code of ethics established by the Internal Audit association in Indonesia or the Internal Audit code of ethics that is generally applicable internationally;
- Internal auditor requirements in the Internal Audit Unit;
- Accountability of the Internal Audit Unit;
- Prohibition of duplicate duties and positions of internal auditors and executors in the Internal Audit Unit from carrying out company operational activities in the Issuer or Public Company or its subsidiaries.

## Realization of Internal Audit Activities

### Internal Audit Unit Duty Implementation Report

Audit activities are including:

- Review existing business processes and inherent risks as well as the causing factors to ensure compliance aspect to the policy, law, and regulation.
- Review assets security and utilization, evaluate the efficiency of resource utilization,



meminimalisir kerugian dan pemborosan dalam menghasilkan suatu output.

3. Review pelaksanaan operasional apakah telah sesuai dengan standar operasional prosedur.

Kegiatan audit internal dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan memperhatikan setiap risiko, dikenali dan dikelola secara tepat. Pengendalian internal dilaksanakan secara efektif, segala kebijakan, prosedur dan peraturan ditaati, serta setiap kecurangan telah diantisipasi, diidentifikasi, diinvestigasi dan diatasi.

Hasil Audit Internal yang berupa rekomendasi untuk perbaikan dilaporkan secara periodic kepada pihak manajemen dan Komite Audit. Implementasi atas hasil audit internal ini dimonitor secara berkesinambungan.

in this case, refers to the capability to minimize loss and excess in generating output.

3. Review implementation of operational activity whether it has complied with the standard operating procedure.

Internal audit activities had been done based on the standard operating procedure by considering every risk, acknowledge, and managed properly. The internal control is implemented effectively, every policy, procedure, and regulation have complied, and every fraud has been anticipated, identified, investigated and mitigated.

Result of the Internal Audit is in form of improvement recommendations that is reported periodically to the management and Audit Committee. Implementation of the internal audit result is monitored in an ongoing basis.

# Akuntan Publik

Public Accountant

## Dasar Hukum Penunjukan KAP

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan perseroan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) independen bertanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan. Pada tahun 2019, Perusahaan telah menunjuk KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (afiliasi PKF) yang bertanggung jawab untuk melakukan audit tahun buku 2019. Penunjukan KAP tersebut telah mengikuti syarat dan kondisi yang telah ditetapkan Perseroan.

## Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Laporan Keuangan. Untuk tahun 2019, Laporan Keuangan Perseroan memperoleh Opini disajikan secara Wajar tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan Perseroan telah menyajikan Laporan Keuangan secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material.

## KAP Appointment Framework

Independent monitoring function over the Company's financial aspects is carried out by performing External Audit by Public Accounting Firm (KAP). External auditors who audited the Company's financial statements in fiscal year 2019 has been appointed in the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is carried out in accordance with the applicable procurement mechanism for goods and services. To guarantee the independence and quality of the examination results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Company.

An independent Public Accounting Firm (KAP) is responsible for auditing the Company's annual financial statements. In 2019, the Company appointed KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (PKF affiliates) responsible for auditing the fiscal year 2019. The appointment of the KAP had followed the terms and conditions as stipulated by the Company.

## Audit Result

Results of the audit that have been carried out by external auditors are submitted in form of Opinion Financial Statements. For 2019 period, the Company's Financial Statements obtains Unqualified fairly presented in all material respects opinion. This indicates that the Company has presented Financial Statements accurately and in accordance with prevailing standards and is free from material misstatements.

# Sistem Pengendalian Internal

## Internal Control System

Perseroan memastikan seluruh aktivitas keuangan dan operasional dikendalikan secara tepat, dimana :

1. Dalam aspek pengendalian keuangan, Perseroan memastikan agar kegiatan usaha Perseroan dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan Perseroan dapat dipercaya.
2. Dalam aspek pengendalian operasional, Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi telah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas seperti:
  - a. Perseroan menerapkan aspek three lines of defense, di mana lini pertama adalah manajemen operasional, lini ke dua adalah *risk management* dan fungsi kepatuhan, lini ke tiga adalah audit internal.
  - b. Perseroan menerapkan sistem pengendalian batas persetujuan pembiayaan sesuai dengan jenjang kewenangan komite pembiayaan, mulai dari kewenangan yang diberikan kepada Head Department sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - c. Perseroan secara tegas menerapkan sistem dual control dengan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi risiko kecurangan proses operasional perusahaan dalam satu departemen maupun lintas departemen.

The Company ensures that all of the financial and operational activities have been controlled appropriately, where:

1. In financial controlling aspect, the Company ensures that the Company's business activities are recorded in accordance with applicable accounting principles and accounting standards so that the Company's financial statements can be trusted.
2. In operational controlling aspect, the Company ensures that the organizational structure has been made in such a way that there is a strict separation of duties and responsibilities such as:
  - a. The Company applies the three lines of defense aspect, where the first line is operational management, the second line is riskmanagement and the compliance function, and the third line is internal audit.
  - b. The Company applies a system of financing approval limits in accordance with the level of authority of the financing committee, starting from the authority given to the Head of Department to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
  - c. The Company explicitly applies a dual control system based on prudential principles to minimize the risk of fraudulent operations in the Company in one department or across departments.

Perseroan akan lebih meningkatkan intensitas program audit untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan internal Perseroan dan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Internal Audit akan memeriksa pemenuhan seluruh syarat komite

The Company will further increase the intensity of the audit program to prevent things that deviate from the Company's internal provisions and regulations set by the Financial Services Authority. Internal Audit will check the fulfillment of all audit committee requirements

audit baik melalui program pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan secara tiba-tiba (sidak). Divisi manajemen risiko dan Internal Audit Perseroan akan membuat laporan dan memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah dijalankan dan diterapkan di setiap divisi Perseroan.

Hal-hal yang telah menjadi kekuatan Perseroan dalam proses pengendalian di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah dasar atas komponen pengendalian internal lainnya yang membentuk budaya dan perilaku manusia atas pentingnya kesadaran pengendalian. Perseroan menerapkan Lingkungan Pengendalian yang efektif di mana semua karyawan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, batas kewenangan mereka, mempunyai pengetahuan yang memadai, dan mengerti serta berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar.

### 2. Penilaian Risiko

Perseroan senantiasa mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Perseroan telah melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang mengacu pada risiko yang tercantum dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan melakukan penilaian risiko (*self assesment*) secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi Perseroan, di mana hasil serta rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

both through regular inspection programs and sudden checks (inspections). The Risk Management and Internal Audit Divisions of the Company will make a report and ensure that the implementation of risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulations has been implemented and applied in each division of the Company.

Matters that have become the Company's strength in the above control process are as follows:

### 1. Control Environment

The Control Environment is the basis of other internal control components that shape human culture and behavior on the importance of control awareness. The Company implements an effective Control Environment where all employees understand their duties and responsibilities, limits their authority, have adequate knowledge, and understanding and are committed to doing the right activities in the right way.

### 2. Risk Assessment

The Company always identifies and analyzes risks in achieving the stated business objectives. The Company has identified risks that refer to 7 (seven) risks listed in the Company's Risk Management Implementation Guidelines and conducts continuous self-assessments to measure the level of risk faced by the Company, where the results and recommendations for improvements are submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengendalian internal yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur dan penetapan batas kewenangan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Setiap kebijakan dan prosedur didokumentasikan, dipelihara dan dikinakan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis Perseroan.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Perseroan telah membuat sistem informasi dan komunikasi yang baik dalam bentuk communication tree sehingga setiap karyawan Perseroan selalu terhubung untuk mendapatkan setiap informasi yang terpercaya dan tepat waktu.

### 5. Pemantauan

Manajemen Perseroan melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala terhadap kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian telah beroperasi sebagaimana diharapkan dan dimodifikasi melalui Divisi Audit Internal. Kekurangan yang signifikan dan kelemahan material selalu dikomunikasikan kepada Komite Audit sebagai bagian dari setiap pemeriksaan.

## Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Efektifitas sistem pengendalian internal Perseroan tercermin dalam tiga proses yaitu:

### Proses Level Entitas

- a. Terealisasinya peningkatan hasil pengawasan internal pada level entitas. Unit Audit Internal Perseroan semakin meningkatkan mutu pengawasan dan

### 3. Control Activities

Control activities are the application of principles and techniques of internal controls as outlined in policies, procedures and determination of authority limits to mitigate risks that have been identified and measured. Every policy and procedure is documented, maintained and updated periodically by considering changes in the Company's business environment.

### 4. Information and Communication

The Company has established a good information and communication system in the form of a communication tree so that every employee of the Company is always connected to get any reliable and timely information.

### 5. Monitoring

The Company's management conducts continuous and periodic assessments of the quality of performance of internal controls to determine whether the controls are operating as expected and modified through the Internal Audit Division. Significant shortcomings and material weaknesses are always communicated to the Audit Committee as part of each examination.

## Evaluation on Internal Control System Effectiveness

Effectiveness of the Company's internal control system is reflected in three processes, as follows:

### Entity Level Process

- a. Realization of improving internal control results at the entity level. The Company's Internal Audit Unit further improves the quality of supervision and audit checks

pemeriksaan audit terhadap kinerja pada setiap departemen, cabang dan proyek. Perseroan juga akan langsung menindaklanjuti.

- b. Setiap kritik dan saran yang ditujukan kepada Perseroan, sehingga semua karyawan pada setiap tingkat dapat berkontribusi dengan ikut mengawasi dan melaporkan terjadinya ketidakjujuran pada tiap-tiap wilayah kerja dalam Perseroan. Untuk menjaga komitmen penerapan tata kelola perusahaan, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip kode etik secara berkesinambungan pada setiap tingkat pekerja.

### Proses Level Bisnis

Adanya peningkatan cakupan pengawasan internal dalam proses level bisnis telah berdampak pada laporan keuangan, terutama dari segi pengenalan risiko yang kini dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih akurat dan *accountable*. Hal ini terlihat jelas dari adanya pengawasan internal pada proses persediaan, pelaporan keuangan, penjualan dan piutang.

### Proses Level Teknologi Informasi

- Peningkatan jaringan dan sistem keamanan;
- Peningkatan kualitas teknologi informasi

Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

on the performance of each department, branch office and project. The company will also directly follow up

- b. Every criticism and suggestion addressed to the Company, so that all employees at every level can contribute by participating in monitoring and reporting dishonesty in each work area in the Company. To maintain commitment to the implementation of corporate governance, the Company has applied the principles of the code of ethics on an ongoing basis at every level of employees.

### Business Level Processes

An increase in the scope of internal oversight in the business level process has an impact on financial statements, especially in terms of risk recognition which can now be accounted for more accurately and accountably. This is evident from the existence of internal supervision in the process of inventory, financial reporting, sales and receivables.

### Information Technology Level Processes

- Enhanced network and security systems;
- Improving the quality of information technology

Conventional and Sharia Financial Reports submitted by the Company to the Financial Services Authority and Bank Indonesia in 2019 are as follows:

## Konvensional

## Conventional

Nama Laporan Name of Report	Periode Period	Institusi Institution	Tanggal Penyampaian Submission Date
Laporan SIPP	Januari 2019	OJK	08 Februari 2019
Laporan SIPP	Februari 2019	OJK	08 Maret 2019
Laporan SIPP	Maret 2019	OJK	08 April 2019
Laporan SIPP	April 2019	OJK	08 Mei 2019
Laporan SIPP	Mei 2019	OJK	04 Juni 2019
Laporan SIPP	Juni 2019	OJK	08 Juli 2019
Laporan SIPP	Juli 2019	OJK	09 Agustus 2019
Laporan SIPP	Agustus 2019	OJK	10 September 2019
Laporan SIPP	September 2019	OJK	09 Oktober 2019
Laporan SIPP	Oktober 2019	OJK	08 November 2019
Laporan SIPP	November 2019	OJK	09 Desember 2019
Laporan SIPP	Desember 2019	OJK	08 Januari 2020

## Syariah

## Sharia

Nama Laporan Name of Report	Periode Period	Institusi Institution	Tanggal Penyampaian Submission Date
Laporan SIPP	Januari 2019	OJK	08 Februari 2019
Laporan SIPP	Februari 2019	OJK	08 Maret 2019
Laporan SIPP	Maret 2019	OJK	08 April 2019
Laporan SIPP	April 2019	OJK	08 Mei 2019
Laporan SIPP	Mei 2019	OJK	14 Juni 2019
Laporan SIPP	Juni 2019	OJK	08 Juli 2019
Laporan SIPP	Juli 2019	OJK	09 Agustus 2019
Laporan SIPP	Agustus 2019	OJK	10 September 2019
Laporan SIPP	September 2019	OJK	09 Oktober 2019
Laporan SIPP	Oktober 2019	OJK	08 November 2019
Laporan SIPP	November 2019	OJK	09 Desember 2019
Laporan SIPP	Desember 2019	OJK	08 Januari 2020

# Kepatuhan Perseroan

## Company Compliance

Industri pembiayaan merupakan lingkungan kecil dari penyediaan jasa keuangan, yang kegiatan usahanya diatur secara ketat oleh beragam ketentuan dari otoritas. Pemenuhan berbagai ketentuan tersebut merupakan komitmen Perseroan sebagai bagian dari pengelolaan risiko terkait kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Beberapa ketentuan yang mengatur ketat industri pembiayaan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan; No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang masing-masing tertanggal 19 November 2014 dan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Beberapa poin penting yang harus dipenuhi dan ditaati Perseroan adalah sebagai berikut :

The financing industry is a small environment of providing financial services, whose business activities are strictly regulated by various provisions of the authorities. Fulfillment of these various provisions constitutes the Company's commitment as part of managing risks related to compliance. Some provisions that strictly regulate the financing industry include Financial Services Authority Regulation No. 28/POJK.05/2014 concerning Financing Companies Business Permit and Institution; No. 29/POJK.05/2014 concerning the Implementation of Business for Financing Companies; No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, each of which was dated November 19, 2014 and No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Some important points that must be fulfilled and adhered to by the Company are as follows

Keterangan Description	Status	Catatan Notes	
Modal Sendiri dibawah modal disetor Minimum Own Capital	Tidak Memenuhi Ketentuan Not fulfilled	Modal Sendiri dibandingkan dengan Modal Disetor (MSMD) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 38,78%, dibawah syarat minimum modal sendiri, yaitu sebesar 50% dari modal disetor	Internal Capital (Equity) to Paid Up Capital (MSMD ratio) of the Company as of December 31, 2019 was 38.78%, under the minimum own capital requirement, which is 50% of paid up capital
Pembatasan jabatan untuk Direksi Position Restrictions for Directors	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Berdasarkan dokumen dan data yang ada pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi syarat pembatasan jabatan untuk Direksi, karena tidak ada Direktur Perseroan yang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain atau tidak menjadi anggota Dewan Komisaris di lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain.	Based on documents and data available on December 31, 2019, the Company has fulfilled the position restriction requirements for the Board of Directors, because there are no Directors of the Company who hold concurrent positions as Directors in other companies or not being members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other Financing Companies .



Keterangan Description	Status		Catatan Notes
		Anggota Direksi juga tidak ada yang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi di lebih dari 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain, baik Perusahaan Pembiayaan atau non Perusahaan Pembiayaan. Serta tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di lebih dari 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain, baik Perusahaan Pembiayaan atau non Perusahaan Pembiayaan.	There are also no members of the Board of Directors who hold concurrent positions as Directors in more than 1 (one) Issuer or other Public Company, either a Financing Company or a Non-Financing Company. As well as not making concurrent positions as a member of the Board of Commissioners in more than 3 (three) Issuers or other Public Companies, either Financing Companies or non-Financing Companies.
Pembatasan jabatan untuk Dewan Komisaris Position Restrictions for Commissioners	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Berdasarkan dokumen dan data yang ada pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi syarat pembatasan jabatan untuk Dewan Komisaris, karena dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris di lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.	Based on documents and data available on December 31, 2019, the Company has fulfilled the position restriction requirements for the Board of Commissioners, because none of the Company's Board of Commissioners members hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other Financing Companies and/or as a member of the Board of Commissioners in more than 2 (two) other Issuers or Public Companies.
Jumlah minimum piutang pembiayaan Minimum Amount of Financing Receivables	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Jumlah piutang pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 62% dari jumlah aset. Rasio tersebut berada di atas syarat minimum jumlah piutang pembiayaan yang harus dimiliki, yaitu sekurang-kurangnya 40% dari jumlah aset.	The amount of the Company's financing receivables as of December 31, 2019 is 62% of the total assets. This ratio is above the minimum requirement for the amount of financing receivables that must be owned, which is at least 40% of the total assets.
Jumlah pinjaman dibanding modal sendiri Loan Amount compared to Own Capital	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Jumlah pinjaman yang dimiliki di tahun 2019 adalah sebesar 3,8 kali dari ekuitas atau jauh di bawah ketentuan maksimum sebesar 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.	The loan amount of the Company as of December 31, 2019 is 3,8 times that of equity or far below the maximum requirement of 10 times, both for foreign and domestic loans.
Modal minimum Minimum Paid-up Capital	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp275,36 miliar telah sesuai dengan syarat modal minimum sebesar Rp100 miliar untuk perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	The Company's paid up capital in 2019 amounted to Rp275.36 billion was in accordance with the minimum paid-up capital requirement of Rp 100 billion for finance companies in the form of limited liability companies.

# Perkara Penting

## Litigation

Sepanjang tahun 2019, Perseroan menghadapi gugatan atau kasus hukum di pengadilan, baik pidana maupun perdata. Berikut ini adalah beberapa Perkara Penting yang dihadapi oleh Perseroan di tahun 2019 :

In 2019, the Company involved in lawsuits or legal cases in court, both criminal and civil. Some of the significant litigations involving the Company in 2019 are as follows:

### Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Significant Litigations Involving The Company

Pokok Perkara Principal Case	Status Penyelesaian Perkara Case Settlement Status	Risiko yang Dihadapi dan Nilai Nominal Tuntutan Risks and Total Claims	Pengaruh terhadap Perusahaan Impact on the Company	Sanksi (apabila ada) Punishment (if any)
Laporan Polisi Penggelapan unit IBF PT Trimega Utama Corporindo Police Reports of PT Trimega Utama Corporindo's IBF Unit Darkening	Dihentikan proses penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa yang dimaksud dalam laporan bukan merupakan tindak pidana. The investigation process was terminated on the grounds that the incident referred to in the report was not a criminal offense	Nilai nominal tuntutan Rp58 miliar. Nominal value of Rp58 billion	Recovery menjadi terhambat & NPF Recovery is hampered & NPF	
Laporan Polisi Penggelapan unit IBF PT Mikgro Metal Perdana Police Report Embezzlement IBF unit PT Mikgro Metal Prime	Masih dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian. Still under investigation by the Police	nilai nominal tuntutan Rp82 miliar. Nominal value of Rp82 billion claims	Recovery menjadi terhambat & NPF Recovery is hampered & NPF	
Permohonan Kasasi Putusan Pailit PT Petrona Mining Contractors Application for Cassation on Bank Petrona Mining Contractors' Bankrupt Decision	Permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. The appeal was rejected by the Supreme Court	nilai nominal tuntutan Rp23 miliar. nominal value of Rp23 billion claims	Recovery menjadi terhambat & NPF Recovery is hampered & NPF	
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Batu Anugrah Mineral Resources Lawsuit Against the Law by PT Batu Anugrah Mineral Resources	Penetapan Perdamaian sesuai kesepakatan kedua belah pihak Lawsuit Against the Law by PT Batu Anugrah Mineral Resources	Nilai nominal tuntutan Rp5.6 miliar nominal value of Rp5.6 billion claim	Recovery menjadi terhambat & NPF Recovery is hampered & NPF	

# Manajemen Risiko

## Risk Management

### Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Risiko dalam konteks Perseroan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan, pendapatan dan operasional Perusahaan. Manajemen risiko dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial (risiko) yang bisa jadi dapat mempengaruhi Perseroan untuk kemudian dikelola sedemikian rupa agar sesuai dengan *risk appetite* (toleransi terhadap risiko), untuk menyediakan keyakinan yang memadai dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan.

Dasar penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada POJK 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

### Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam usaha mencapai visi Perseroan, Perseroan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari praktik manajemen, sistem organisasi, dan GCG; sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
2. Menerapkan manajemen risiko berdasarkan standar yang berlaku, struktur organisasi, dan mandat yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.

### Risk Management Implementation Framework

Risk in the context of the Company is a potential event, both predictable and unanticipated that has a negative impact on the Company's growth, revenues and operations. Risk management is designed to identify potential events (risks) that may affect the Company and then be managed in such a way as to be in accordance with risk appetite (tolerance for risk), to provide adequate confidence in the achievement of corporate goals.

The basis for the implementation of the Company's risk management refers to POJK 1/POJK.05/2015 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and Financial Services Authority Circular Letter Number 10/SEOJK.05/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management and Reports on the Results of Self-Assessment of Implementation Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions

### Risk Management Policy

As an effort to achieve the Company's vision, the Company has established the following Risk Management Policies:

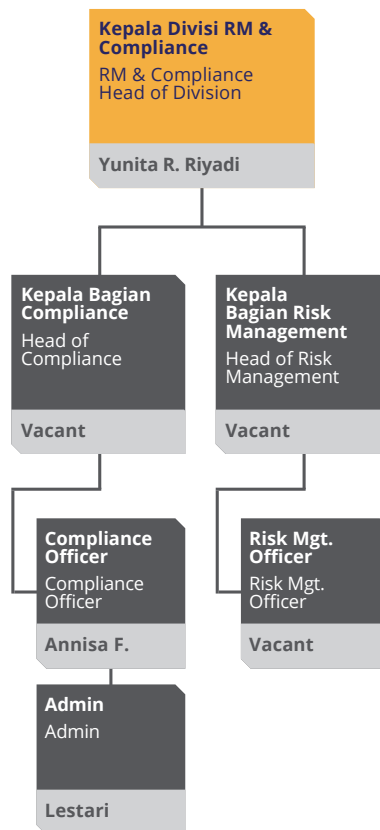
1. Risk management is an integral part of management practices, organizational systems, and GCG; so that it can improve quality and accountability in the decision-making process.
2. Implement risk management based on applicable standards, organizational structure, and appropriate mandates to avoid conflicts of interest.

3. Menerapkan manajemen untuk mendukung GCG.
4. Menyusun rencana asesmen risiko yang terintegrasi dengan RBT pada setiap tahun anggaran serta membuat laporan hasil penanganan risiko secara periodik. Melakukan inovasi, peninjauan, dan peningkatan budaya risiko secara berkesinambungan dengan fokus pada peningkatan sistem, infrastruktur, dan kompetensi SDM.
5. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektifitas kebijakan manajemen risiko.

3. Implement management to support GCG.
4. Prepare a risk assessment plan that is integrated with RBT in each fiscal year and make periodic reports on the results of risk management. Continuously innovating, reviewing and enhancing the risk culture with a focus on improving HR systems, infrastructure and competencies.
5. Conduct periodic evaluations of the effectiveness of risk management policies.

## Struktur Manajemen Risiko Pelatihan dan

## Risk Management Structure Risk Management



## Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Di tahun 2019, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawan dalam pengembangan kompetensi manajemen risiko, dengan rincian sebagai berikut:

## Competency Training and Development

In 2019, the Company engaged employees in developing risk management competencies, with the following details:

### Rekapitulasi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko 2019

Recapitulation of Risk Management Training and Competency Development 2019

No	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Materi Material	Nama Peserta Name of Participants	Penyelenggara Organizer
1	09 Januari 2019	Sosialisasi Penerapan dan Pelaporan Data Registri Aset Dissemination of Asset Registry Data Implementation and Reporting	Yunita R. Riyadi - Compliance Head	APPI
2	10 Januari 2019	Sosialisasi Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Socialization of Amendment to Regulation No. I-A concerning Listing of Shares and Equity Securities other than shares issued by the Listed Company	Yunita R. Riyadi - Compliance Head	IDX
3	25 Januari 2019	Peresmian Sistem Registry Asset dan Pemaparan pokok-pokok POJK 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Inauguration of the Asset Registry System and Presentation of POJK 35/POJK.05/2018 points concerning Financing Company Businesses	Yunita R. Riyadi - Compliance Head	APPI & OJK
4	12 Februari 2019	Sosialisasi POJK 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal Socialization of POJK 36/POJK.04/2018 concerning Procedures for Examination in the Capital Market Sector	Annisa Farikhati - Senior Compliance Officer	OJK
5	21 Februari 2019	PSAK71 "Implementation and way forward seminar" PSAK71 "Implementation and way forward seminar"	Alberta - Ass. Manager risk Management, Ahmad Nasrun -IT Supervisor, Destri respati-Ass. Manager Accounting, Yesy Mutiara- Staff Khusus	PT ISIS Indonesia and Numerial Technologies Collaborate with PWC Indonesia

## Rekapitulasi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko 2019

Recapitulation of Risk Management Training and Competency Development 2019

No	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Materi Material	Nama Peserta Name of Participants	Penyelenggara Organizer
6	14 Mei 2019	Sosialisasi Uji Coba Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Antara IDXnet dengan SPE Otoritas Jasa Keuangan Socialization of Trial Integrated Electronic Reporting Facility Between IDXnet and SPE Financial Services Authority	Annisa Farikhati - Senior Compliance Officer	Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
7	2 Juli 2019	Strategi Implementasi GCG yang efektif dengan tugas Corporate Secretary dan POJK Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Effective GCG Implementation Strategy with the tasks of Corporate Secretary and POJK Number 21/POJK.04/2014 concerning the Implementation of Guidelines for Public Corporate Governance	Yunita R. Riyadi - Compliance Head	Bursa Efek Indonesia
8	14 November 2019	Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) berbasis Risiko serta Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dissemination Activities Provisions for Application of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU and PPT) Risk-based and Risk Assessment of Money Laundering and Criminal Acts of Funding Terrorism in the Financial Services Sector	Yunita R. Riyadi - Compliance Head	OJK

## Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Materi Material	Nama Peserta Name of Participants	Penyelenggara Organizer
15 Agustus 2019	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Yati Wiryandini (Credit Risk and Admin Head)	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Agency

## Profil dan Mitigasi Risiko

Untuk meminimalisasi risiko atas pemberian dan pengelolaan fasilitas pembiayaan, dalam setiap kegiatan operasionalnya Perseroan mengacu kepada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang mencakup :

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
4. Sistem informasi Manajemen Risiko dan
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan mengacu pada 7 (tujuh) risiko sesuai POJK 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yaitu :

### 1. Risiko Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan yaitu ketidakmampuan debitur/nasabah untuk membayar kembali baik sebagian maupun seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini dapat timbul karena berbagai hal, baik eksternal maupun internal.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi antara lain adanya perubahan kondisi atau iklim usaha debitur yang menyebabkan menurunnya kinerja operasional atau

## Risk Profile and Mitigation

To minimize the risk of granting and managing financing facilities, in each of its operational activities the Company refers to the Company's Risk Management Implementation Guidelines which include:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners
2. Adequate policies, procedures and risk limits
3. Adequate identification, measurement, monitoring and risk control processes
4. Risk Management information systems and
5. A comprehensive internal control system.

Risk mitigation efforts carried out by the Company refer to 7 (seven) risks in accordance with POJK 1/POJK.05/2015 concerning the Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and Financial Services Authority Circular Letter Number 10/SEOJK.05/2016 concerning Risk Management Implementation Guidelines and Self-Assessment Results Report on Risk Management Implementation for Non-Bank Financial Services Institutions, namely:

### 1. Financing Risk

The Company faces financing risks, namely the inability of the debtor/customer to repay either partially or all the financing facilities provided, both the financing principal and the interest. This risk can arise due to various things, both external and internal.

External factors that can affect include changes in the condition or climate of the debtor's business which causes a decrease in the operational or financial performance

keuangan debitur yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kemampuan debitur menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk kepada Perseroan. Dari sisi internal, risiko ini dapat timbul akibat lemahnya sistem pengelolaan kredit dan manajemen piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga meningkatkan risiko ketidاكلancaran pembayaran debitur yang dapat mengganggu pendapatan dan kinerja Perseroan.

Salah satu faktor eksternal yang mengakibatkan turunnya kualitas tagihan Perseroan yang diakibatkan oleh gagal bayar dari para debitur adalah akibat melemahnya harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir, khususnya batubara yang telah melemah sejak awal tahun 2011 hingga pertengahan kuartal kedua 2016. Mengingat sebagian besar dari pembiayaan yang disalurkan jatuh pada sektor pertambangan, memburuknya sektor tersebut akan menyebabkan banyak debitur Perseroan mengalami kerugian dan tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk kepada Perseroan.

Ketidاكلancaran atau kegagalan pembayaran angsuran pokok maupun bunga dialami dalam jumlah yang cukup besar dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

## 2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang kebutuhan Perseroan atau tidak dilaksanakannya sebagian atau

of the debtor which will ultimately have a negative impact on the debtor's ability to settle his/ her obligations, including to the Company. Internally, this risk can arise due to the weakness of the credit management system and the management of accounts receivable that is not managed carefully, thereby increasing the risk of debtor payment defaults that can disrupt the Company's revenue and performance.

One of the external factors that resulted in a decline in the quality of the Company's bills due to default from debtors was the result of weakening commodity prices in recent years, particularly coal which had weakened since the beginning of 2011 until the middle of the second quarter of 2016. Considering a large portion of the channeled financing falling in the mining sector, the deterioration of the sector will cause many of the Company's debtors to suffer losses and not be able to complete their obligations, including to the Company.

The inability or failure of payment of principal and interest installments experienced in large enough amounts can have a negative impact on the sustainability of the Company's business.

## 2. Operational Risk

Operational risk is the risk faced by the Company in relation to operational and procedural systems and controls that do not support the needs of the Company or do not carry out part or all of the operational



seluruh sistem operasional dan prosedur. Risiko ini berpengaruh terhadap penurunan kinerja operasi dalam memproses transaksi usaha yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi, kualitas pelayanan kepada nasabah atau konsumen dan mempengaruhi kualitas pembiayaan Perseroan.

### 3. Risiko Strategi

Untuk percepatan pertumbuhan bisnis, Perseroan akan menjalankan strategi bisnisnya secara lebih prudent, dengan melakukan sinergi grup dan intensive relationship dengan customer & dealer, memperbaiki Service Level Agreement dan meningkatkan pengetahuan seluruh SDM terkait analisa pembiayaan dan risiko.

Sektor usaha pembiayaan alat berat, mesin dan transportasi masih memiliki banyak ruang untuk berkembang mengingat prospek dari industri alat berat, mesin dan transportasi ini di Indonesia masih cukup menjanjikan dan juga sektor pembiayaan merupakan sektor yang cukup baru bila dibandingkan dengan sektor keuangan non-bank lainnya.

Pangsa pasar besar serta potensi pertumbuhan yang menarik dapat mengalihkan fokus perusahaan pembiayaan lain ke sektor usaha pembiayaan alat berat, mesin dan transportasi ini. Hal ini dapat meningkatkan persaingan usaha antar perusahaan pembiayaan yang pada akhirnya dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang mengfokuskan diri pada pembiayaan alat-alat berat guna mendukung bisnis utama grup Perseroan.

systems and procedures. This risk affects the decline in operating performance in processing business transactions which results in disruption of the smooth operation, quality of service to customers or consumers and affects the quality of the Company's financing.

### 3. Strategy Risk

To accelerate business growth, the Company will carry out its business strategy more prudently, by conducting group synergy and intensive relationship with customers and dealers, improving Service Level Agreement and increasing knowledge of all HR related to the analysis of financing and risk.

The heavy equipment, machinery and transportation business sector still has plenty of room to develop considering the prospects of the heavy equipment, machinery and transportation industry in Indonesia are still quite promising and also the financing sector is a fairly new sector when compared to other non-bank financial sectors.

The large market share and attractive growth potential can shift the focus of other finance companies to the heavy equipment, machinery and transportation business sector. This can increase business competition among finance companies which ultimately can negatively affect the sustainability of the Company's business which focuses on financing heavy equipment to support the Group's main business.

#### 4. Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dari arus kas masa yang akan datang atas margin pembiayaan yang terjadi karena adanya kenaikan suku bunga pendanaan, sedangkan suku bunga pembiayaan tetap. Sebagian besar bisnis perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha dengan suku bunga tetap, jika biaya sumber dana (*cost of fund*) yang diperoleh Perseroan meningkat, hal ini akan dapat menurunkan tingkat keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian (*negative margin*) pada usaha Perseroan.

#### 5. Risiko Kepengurusan

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi dalam industri pembiayaan. Secara khusus, Perseroan sangat mengandalkan keahlian manajemen senior Perseroan dalam industri pembiayaan. Ketidakmampuan manajemen senior dalam mempertahankan para tim utama seperti para manajer, *leasing officer*, dan tenaga terampil lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan.

#### 6. Risiko Tata Kelola

Dalam setiap aspek bisnisnya, Perseroan menerapkan lima prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan kewajaran/kesetaraan. Ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap

#### 4. Risk of Assets and Liabilities

Interest rate risk is the risk of future cash flows on the financing margin that occurs due to an increase in funding interest rates, while the fixed interest rate is fixed. Most of the company's business is engaged in leasing financing with a fixed interest rate, if the cost of funds obtained by the Company increases, this will reduce the level of profits or even cause a negative margin on the Company's business.

#### 5. Management Risk

The Company's business activities depend on the Company's ability to attract and retain highly qualified workforce in the financing industry. In particular, the Company relies heavily on the Company's senior management expertise in the financing industry. The inability of senior management to retain key teams such as managers, leasing officers, and other skilled personnel can affect business activities, cash flows, operating results, financial conditions or prospects of the Company.

#### 6. Governance Risk

In every aspect of its business, the Company applies five principles of governance which include transparency, accountability, independence, responsibility and fairness/equality. Inaccuracy of management style, control environment and behavior of each party involved directly or indirectly with the Company can cause failure in

Perseroan dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Untuk menunjang kinerja kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan telah memiliki komite penunjang yaitu : Komite Pembiayaan, Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite lainnya yang akan dibentuk Perseroan adalah Komite Tata Kelola dan Komite ALCO. Pembentukan komite dan pedoman yang wajib disusun akan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur terkait komitekomite tersebut.

## 7. Risiko Dukungan Dana

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung pada tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang memadai akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan Perseroan.

Risiko lain yang terkait dengan pendanaan dan likuiditas adalah ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan aktivitas pembiayaan yang dijalankan Perseroan sehingga hal ini dapat mengakibatkan terganggunya arus kas Perseroan. Demikian pula dengan ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh temponya akan berdampak kepada reputasi Perseroan dimata kreditur dan

the implementation of good corporate governance (GCG).

To support the work performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Company has supporting committees, namely: the Financing Committee, the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee. Another committee that will be formed by the Company is the ALCO Governance and Committee. The formation of committees and guidelines that must be compiled will be adjusted to the Financial Services Authority Regulations governing the committees.

## 7. Risk of Financial Support

The Company's growth is highly dependent on the availability of funding originating from banking facilities and other funding sources to support the financing activities carried out by the Company. Therefore, the inability to obtain adequate funding sources will have an impact on the Company's declining growth.

Another risk associated with funding and liquidity is the inability of the Company to obtain funds with a period that is in accordance with the financing activities carried out by the Company so that this can result in disruption of the Company's cash flows. Similarly, the inability to repay loans at the maturity date will have an impact on the Company's reputation in the eyes of creditors and affects the Company's ability to obtain new funding sources in the future.

mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru dikemudian hari.

## Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Manajemen risiko telah berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penguatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan. Sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan mampu meminimalisir dan/atau menekan tingkat dampak serta kemungkinan terjadinya risiko. Hal ini terlihat dari efektivitas atas kualitas, kuantitas, dan waktu penyelesaian suatu rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Melalui sistem manajemen risiko ini dapat mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga mencapai target yang telah ditetapkan.

## Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

Risk management has contributed positively in the process of planning, decision making, and strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company. The risk management system implemented by the Company is able to minimize and/or reduce the level of impact and the possibility of risk occurrence. This can be seen from the effectiveness of the quality, quantity, and time of completion of a predetermined risk mitigation plan. Through this risk management system, it can support the Company in achieving significant revenue growth to achieve the set targets.

# Keterbukaan Informasi

## Information Disclosure

Otoritas mengatur melalui POJK no. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengikat seluruh perusahaan publik termasuk Perseroan. Wujud kepatuhan atas ketentuan tersebut dilaksanakan melalui penyampaian laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau fakta material kepada masyarakat melalui :

1. Situs Web IBF dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
2. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
3. Laporan Tahunan
4. Situs online idxnet dan speojk

Informasi atau fakta material yang disampaikan tersebut senantiasa disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 - POJK no. 31/POJK.04/2015.

The authority regulates through POJK No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, which binds all public companies including the Company. The form of compliance with these provisions is carried out through the submission of reports on material information or facts to the Financial Services Authority and to make announcements of information or material facts to the public through:

1. The IBF Web Site in Indonesian and English
2. Daily newspapers in Indonesian language with national circulation
3. Annual Reports
4. Online site idxnet and speojk

The material information or facts submitted are always adjusted to the provisions stated in Article 6 - POJK no. 31/POJK.04/2015.

No	Tanggal Date	Nomor Surat Letter Number	Uraian Description
1.	10 Januari 2019	001/IBFN-IDX/0119	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Desember 2018 Monthly Report of Securities Holders Registration as of December 2018
2.	10 Januari 2019	002/IBFN-IDX/0119	Perubahan Komite Audit Changes to the Audit Committee
3.	8 Februari 2019	003/IBFN-IDX/0219	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Januari 2019 Monthly Report of Securities Holder Registration as of January 2019
4.	11 Maret 2019	004/IBFN-IDX/0319	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Februari 2019 Monthly Report of Securities Holder Registration as of February 2019
5.	18 Maret 2019	005/IBFN-IDX/0319	Pemberitahuan Rencana RUPTS & RUPSLB AGMS & EGMS Plans Announcement
6.	20 Maret 2019	006/IBFN-IDX/0319	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Submission of Proof of Advertisement of GMS Notification
7.	01 April 2019	007/IBFN-IDX/0419	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan Submitting Evidence of Advertising Information on Annual Financial Statements
8.	02 April 2019	008/IBFN-IDX/0419	Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 Submission of the Company's Annual Report for the 2018 fiscal year

No	Tanggal Date	Nomor Surat Letter Number	Uraian Description
9.	02 April 2019	009/IBFN-IDX/0419	Panggilan RUPST & RUPSLB Invitation to the AGMS & EGMS
10.	05 April 2019	010/IBFN-IDX/0419	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPST & RUPSLB Submission of Proof of Advertisement for Summons of AGMS & EGMS
11.	05 April 2019	011/IBFN-IDX/0419	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawarana Umum Report on the from Public Offering Proceeds Realization
12.	08 April 2019	012/IBFN-IDX/0419	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Maret 2019 Monthly Report of Securities Holder Registration as of March 2019
13.	25 April 2019	013/IBFN-IDX/0419	Perubahan Komite Audit Changes to the Audit Committee
14.	26 April 2019	014/IBFN-IDX/0419	Hasil RUPST dan Luar Biasa AGMS and Extraordinary Results
15.	29 April 2019	015/IBFN-IDX/0419	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Submission of Proof of Advertisement of GMS Results
16.	03 Mei 2019	016/IBFN-IDX/0519	Perubahan Internal Audit Changes to Internal Audit
17.	09 Mei 2019	017/IBFN-IDX/0519	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan April 2019 Monthly Report of Securities Holder Registration as of April 2019
18.	12 Juni 2019	018/IBFN-IDX/0619	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Mei 2019 Monthly Report of Securities Holder Registration as of May 2019
19.	08 Juli 2019	019/IBFN-IDX/0719	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Juni 2019 Monthly Report of Securities Holders Registration as of June 2019
20.	10 Juli 2019	020/IBFN-IDX/0719	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Report on Public Offering Proceeds Realization
21.	30 Juli 2019	021/IBFN-IDX/0719	Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui Publik, Pemberitahuan atas pengangkatan dan perubahan komposisi Komite Audit Information Disclosure that needs to be known to the public, notification of the appointment and changes in the composition of the Audit Committee
22.	30 Juli 2019	022/IBFN-IDX/0719	Perubahan Komite Audit Changes to the Audit Committee
23.	31 Juli 2019	023/IBFN-IDX/0719	Keterbukaan informasi yang perlu diketahui Publik, pemberitahuan atas penyampaian Laporan Keuangan periode 30 Juni 2019 Audited Disclosure of information that needs to be known to the public, notification of the submission of Financial Statements for 30 June 2019 Audited period
24.	07 Agustus 2019	024/IBFN-IDX/0819	Penjelasan atas Volatilitas Explanation of Volatility
25.	08 Agustus 2019	025/IBFN-IDX/0819	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Juli 2019 Monthly Report of Securities Holders Registration as of July 2019
26.	9 September 2019	026/IBFN-IDX/0919	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Agustus 2019 Monthly Report of Securities Holder Registration as of August 2019
27.	30 September 2019	027/IBFN-IDX/0919	Pemberitahuan terkait Penggabungan Nilai Nominal Saham ( <i>Reverse Stock</i> ) terhadap Program MESOP Tahap I PT Intan Baruprana Finance Tbk Notification regarding Merger of Reverse Stock Value of MESOP Phase I Program of PT Intan Baruprana Finance Tbk

No	Tanggal Date	Nomor Surat Letter Number	Uraian Description
28.	02 Oktober 2019	028/IBFN-IDX/1019	Penyampaian bukti iklan informasi laporan keuangan internal Submitting proof of advertisement for internal financial statement information
29.	11 Oktober 2019	029/IBFN-IDX/1019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan September 2019 September 2019 Securities Holders Registration Monthly Report
30.	31 Oktober 2019	032/IBFN-IDX/1119	Rencana penyampaian Laporan keuangan Kuartal III tahun 2019 Ditelaah secara terbatas Plans for submitting the 2019 Third Quarter Financial Statements are reviewed in a limited manner
31.	08 November 2019	033/IBFN-IDX/1119	Pengunduran Diri Bapak Erry Sulistio selaku Komisaris IBFN Resignation of Mr. Erry Sulistio as Commissioner of IBFN
32.	08 November 2019	034/IBFN-IDX/1119	Penyampaian materi acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Submission of Extraordinary General Meeting of Shareholders Agenda
33.	11 November 2019	035/IBFN-IDX/1119	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders Plan
34.	11 November 2019	036/IBFN-IDX/1119	Penyampaian Bukti isian Pengumuman RUPS Luar Biasa Submitting Proof for the Announcement of Extraordinary General Meeting of Shareholders
35.	13 November 2019	037/IBFN-IDX/1119	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Oktober 2019 Monthly Report of Securities Holders Registration as of October 2019
36.	25 November 2019	038/IBFN-IDX/1119	Pemberitahuan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notification of Extraordinary General Meeting of Shareholders Summons
37.	27 November 2019	039/IBFN-IDX/1119	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Submission of Proof of Advertisement for GMS Invitation
38.	2 Desember 2019	040/IBFN-IDX/1219	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan Annual Public Expose Implementation Plan
39.	11 Desember 2019	041/IBFN-IDX/1219	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan November 2019 Monthly Report of Securities Holder Registration as of November 2019
40.	12 Desember 2019	042/IBFN-IDX/1219	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan Submission of Annual Public Expose Material
41.	19 Desember 2019	043/IBFN-IDX/1219	Laporan Hasil Public Expose Tahunan Annual Public Expose Results Report
42.	19 Desember 2019	044/IBFN-IDX/1219	Ringkasan Risalah RUPSLB Summary of Minutes of the EGMS
43.	20 Desember 2019	045/IBFN-IDX/1219	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Submission of Proof of Advertisement of GMS Results

## Website

Perseroan menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui *website* <http://www.ibf.co.id>. *Website* tersebut menyediakan berbagai informasi, antara lain mengenai profil Perseroan, visi dan misi, model bisnis, informasi keuangan, berita terbaru, tanggung jawab sosial perusahaan, keterbukaan informasi, dan lain-lain.

## Siaran Pers

Perseroan secara proaktif menyebarkan berita-berita terbaru terkait Perseroan dalam bentuk *News Release* kepada investor, analis, dan media pers. Berita tersebut berisi analisis rinci hasil keuangan dan pengungkapan berita terbaru mengenai Perseroan yang signifikan. *News Release* juga menyediakan nomor kontak serta alamat *email* yang dapat dihubungi untuk komunikasi atau pembahasan secara rinci selanjutnya mengenai Perseroan.

Sepanjang Tahun 2019, Perseroan menerbitkan 5 (lima) *News release*.

## Website

The Company provides access to information and company data through the website <http://www.ibf.co.id>. The website provides various information, including regarding the Company's profile, vision and mission, business models, financial information, the latest news, corporate social responsibility, information disclosure, and others.

## Press Conference

The Company proactively disseminates the latest news related to the Company in the form of *News Release* to investors, analysts, and press media. The news contains a detailed analysis of financial results and the disclosure of the latest news about the Company that is significant. *News Release* also provides contact numbers and e-mail addresses that can be contacted for further detailed communication or discussion regarding the Company.

During 2019, the Company issued 5 (five) *News releases*.



# Paparan Publik

Public Expose



Pelaksanaan prinsip keterbukaan juga dijalankan Perseroan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki informasi yang seimbang. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, salah satunya mengatur pelaksanaan Paparan Publik yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2019. Manajemen dalam forum ini menyampaikan visi, misi, potensi, tantangan serta strategi bisnis yang dilakukan Perseroan.

The implementation of the transparency principle is also carried out by the Company so that all stakeholders have balanced information. Indonesia Stock Exchange Regulation Number I.E concerning Information Delivery Obligations, one of which regulates the implementation of the Public Expose held on December 20, 2018. The Management in this forum delivered the Company's vision, mission, potential, challenges and business strategies

# Kode Etik Perusahaan

## Corporate Code of Ethics

Dalam mengembangkan konsep tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika perusahaan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi konsep kode etik Perusahaan.

In developing the good corporate governance concept, the Company has formulated various policies concerning corporate ethics. The Company strives to apply best ethical standards in carrying out all business activities in accordance with its vision, mission, and culture through the implementation of the concept of the company's code of ethics.

Komitmen Perseroan untuk menerapkan Kode Etik Perusahaan yang mengatur perilaku perusahaan dan individu secara komprehensif sangat tinggi.

The Company has a very high commitment to implement the Code of Ethics that governs corporate and individual behavior comprehensively.

Prinsip prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam membangun mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut:

The GCG principles used as a reference in developing the Company's Code of Ethics are as follows:

- Prinsip Transparansi diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
- Prinsip Kemandirian diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris,
- Transparency Principle is applied by ensuring that every step and process of determining policies and decisions taken by the Board of Commissioners, Directors and all levels of the Company is carried out transparently and can be reviewed.
- Independency Principle is applied by the way the Company conducts its activities independently in accordance with the existing professionalism and code of conduct, without being able to be influenced by any party.
- Accountability Principle is applied by clearly defining the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Directors

Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.

- Prinsip Pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Prinsip Kewajaran diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Isi Kode Etik

Kode etik Perseroan merupakan satu himpunan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika kerja karyawan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku guna mencapai hasil yang sesuai dengan budaya perusahaan. Etika bisnis perusahaan dan etika perilaku Karyawan merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran perusahaan sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi perusahaan.

Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan ini Perseroan yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu berupa:

1. Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.
2. Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.

and all levels of the Company in the organizational structure and description of their respective positions.

- Responsibility Principle is applied by adjusting the Company's management to the applicable laws and regulations and sound corporate principles.
- Fairness Principle is applied by giving a sense of fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and regulations and legislation in force.

## Code of Ethics Contents

Code of conducts is a set of commitments consisting of company business ethics and employee work ethics that are structured to form, regulate and conduct behavior adjustments in order to achieve results that are in line with company culture. The company's business ethics and employee ethics are a set of norms, values, and actions that are believed by the ranks of the company as an ideal standard of behavior for the company.

Furthermore, by applying this Company Code of Conduct, the Company believes that it will benefit in the long term, in the form of:

1. Employees enjoy a work environment that is honest, ethical and open so as to increase employee productivity and overall welfare.
2. The company will enjoy a good reputation, protect against legal claims that may occur and ultimately achieve prosperity and sustainable business success.

3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

Kode Etik Perusahaan menjabarkan Pedoman Perilaku Perusahaan, yang mengacu pada nilai inti kelompok usaha INTRACO PENTA: "CINTA" sebagai berikut:

### ***Collaborative***

Kemampuan mengidentifikasi peluang-peluang dan mengambil tindakan untuk membangun hubungan yang positif dan strategis antar individu, kelompok, departemen, unit atau organisasi untuk membantu mencapai tujuan bisnis.

### ***Innovative***

Kemampuan untuk melakukan perbaikan, pengembangan terus menerus dan menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dengan tujuan memperbaiki proses bisnis untuk dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

### ***Network***

Kemampuan untuk mengembangkan hubungan luas yang bermanfaat dengan berbagai kalangan orang dari berbagai institusi internal dan eksternal baik yang berhubungan ataupun tidak dengan bidang pekerjaan.

### ***Trustworthy***

Kemampuan untuk bisa diandalkan, dipercaya dan membangun hubungan yang hangat dan saling menguntungkan di lingkungan kerja.

3. The community in general will enjoy a good relationship with the Company, which is expected to improve the social and economic welfare of the society.

The Company's Code of Ethics sets out the Company's Code of Conduct, which refers to the core values of the INTRACO PENTA business group: "CINTA" as follows:

### ***Collaborative***

The ability to identify opportunities and take action to build positive and strategic relationships between individuals, groups, departments, units or organizations to help achieve business goals.

### ***Innovative***

The ability to make improvements, continuous development and create something new, both in the form of ideas and real work with the aim of improving business processes to be able to produce maximum performance.

### ***Network***

The ability to develop wide-ranging useful relationships with a variety of people from various internal and external institutions, whether or not related to the field of work.

### ***Trustworthy***

The ability to be reliable, trusted and build a warm and mutually beneficial relationship in the work environment.

### **Assurance**

Kemampuan dalam memberikan keyakinan dan kepastian terhadap tindakan dalam aktivitas kerja dilakukan sesuai dengan standar (waktu, kualitas dan biaya) yang ditetapkan.

## **Pemberlakuan dan Penegakan Kode Etik**

Penegakan kepatuhan di lingkungan Perseroan dalam rangka membentuk, membina dan mengarahkan setiap insan kepada perilaku yang baik. Perseroan telah menyusun kode etik Perusahaan dan Peraturan Perusahaan dimana pada pelaksanaannya senantiasa dipantau dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Jenis Pelanggaran yang dilakukan, dengan cara:

1. Memberikan teguran secara lisan,
2. Memberikan teguran dan peringatan secara tertulis,
3. Penurunan pendapatan pokok/ pembebasan dari jabatan,
4. Pemutusan Hubungan Kerja, dan/atau
5. Memberikan sanksi administrasi dan hukum.

Penerapan dan penegakan kode etik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan sebagai budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari. Pelanggaran terhadap kode etik adalah tindakan indisipliner dan akan ditangani oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Direksi. Setiap Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik wajib melaporkan kepada pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi tersebut dalam menangani GCG atau atasan langsung.

### **Assurance**

The ability to provide confidence and certainty of actions in work activities carried out in accordance with the specified standards (time, quality and cost).

## **Enforcement and Enforcement of the Code of Ethics**

Enforcement of compliance within the Company in the context of forming, fostering and directing every person to good behavior. The Company has compiled a Company code of ethics and Company Regulations in which its implementation is always monitored and can be subject to sanctions according to the Type of Violation committed, by:

1. Give a verbal warning,
2. Give written warning and warning,
3. Decrease in principal income / release from position,
4. Termination of Employment, and / or
5. Provide administrative and legal sanctions.

The application and enforcement of the code of conduct is an obligation that must be carried out consistently by the Board of Commissioners, Directors and all employees as a work culture in daily operational activities. Violation of the code of ethics is disciplinary action and will be handled by parties who have been appointed by the Directors. Every employee who is aware of a violation of the code of ethics must report to the party determined by the Board of Directors in handling GCG or direct supervisor.

## Penetapan Sanksi Disiplin

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direksi dapat mengambil keputusan atas pengenaan sanksi disiplin karyawan, dan keputusan yang diambil telah mengikat untuk ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan sanksi disiplin dilaksanakan oleh Direksi untuk sanksi disiplin sedang dan berat, sedangkan sanksi disiplin ringan dilaksanakan oleh kepala unit kerja terkait.

## Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Secara berkelanjutan, Perseroan melakukan pemantauan terhadap penegakan Etika bisnis dan menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik. Selama tahun 2019 tidak terdapat laporan pelanggaran disiplin.

## Determination of Disciplinary Sanctions

Based on the audit report, the Board of Directors can make decisions on the imposition of employee discipline sanctions, and the decisions made are binding for follow-up by the competent authority. Disciplinary sanctions are implemented by the Directors for moderate and severe disciplinary sanctions, while minor disciplinary sanctions are carried out by the head of the relevant work unit.

## Handling Complaints about Code Violations

On an ongoing basis, the Company monitors business ethics and provides complaints facilities for violations of the Code of Ethics. During 2019 there were no reports of disciplinary violations.

# Sistem Pelaporan Pelanggaran

## Whistleblowing System

Dalam menghadapi dinamika di industri yang semakin kompetitif, Perseroan perlu menjaga reputasi dari isu ataupun persepsi negatif akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.

In dealing with increasingly dynamics in the competitive industry, the Company is required to maintain its reputation from issues or negative perceptions resulting from violation committed by employees.

Perseroan menyadari pentingnya pengendalian internal terhadap penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan perusahaan sehingga dibentuklah *Whistleblowing System*. *Whistleblowing System* merupakan suatu sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh karyawan atau pihak lainnya.

The Company is aware of the importance of internal control against irregularities or fraud that is detrimental to the Company so a Whistleblowing System was formed. Whistleblowing System is a system and procedure designed to receive, examine and follow up complaints submitted by employees or other parties.

### Ruang Lingkup Pelaporan

1. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
2. Permasalahan yang menyangkut independensi audit.
3. Pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Perusahaan.
4. Peraturan internal yang berpotensi kerugian bagi perusahaan.
5. Kecurangan dan atau dugaan korupsi
6. Perilaku yang tidak sesuai Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Profesi.

### Reporting Scope

1. Accounting and internal control issues over financial reporting that have the potential to cause material misstatements in the financial statements.
2. Issues concerning audit independence.
3. Violations of regulations relating to the implementation of the Company's programs.
4. Internal regulations that have the potential for loss for the company.
5. Fraud and or suspected corruption
6. Behavior that is not in accordance with the Company's Code of Ethics and the Code of Professional Ethics.

### Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerapan pengaduan/penyingkapan oleh pengungkap fakta akan diterima oleh Direktur Utama.

### The Party that Manages Complaints

The application of complaints/disclosures by whistleblowers will be accepted by the President Director.

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan *Whistleblowing System*:
  - a. Menerima dan mencatat pengaduan/penyungkapan dari pelapor;
  - b. Melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyungkapan dari pelapor.
  - c. Membuat laporan penyungkapan (*disclosure report*) dan kesimpulan sementara sesuai keputusan komite;
  - d. Meneruskan laporan kepada Komisaris sesuai dengan kriteria pengaduan/penyungkapan fakta;
  - e. Berdasarkan keputusan komite dan Komisaris, melakukan audit investigasi bersama petugas khusus.
  - f. Terkait dengan tindak pidana, hasil investigasi dan laporan tersebut diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
2. Eksternal Investigator
 

Dalam hal substansi pengaduan/penyungkapan terkait dengan citra/reputasi Perseroan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Perusahaan, maka sesuai persetujuan Komisaris, investigasi *Whistleblowing System* dapat bekerja sama dengan tenaga ahli atau konsultan (investigator eksternal) dan atau dengan pihak yang berwajib.

## Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)

Perseroan telah membangun mekanisme pelaporan untuk menindaklanjuti pengaduan karyawan atau stakeholders sesuai dengan Prosedur *Whistleblowing System* Perseroan melalui sarana/media email, facsimile dan SMS.

1. Duties, authorities and responsibilities in managing the Whistleblowing System:
  - a. Receive and record complaints/disclosures from the Whistleblower;
  - b. Conduct an initial review/clarification of complaints/disclosures from the Whistleblower.
  - c. Making a disclosure report and a provisional conclusion according to the committee's decision;
  - d. Forward the report to the Commissioner in accordance with the criteria for reporting/disclosing facts;
  - e. Based on the decision of the committee and the Commissioner, conduct an investigative audit with special officers.
  - f. Related to criminal acts, the results of the investigation and the report are forwarded to the authorities for further processing.
2. External Investigator
 

In the case of the substance of complaints/disclosures related to the image/reputation of the Company and/or cause substantial losses and/or has not been followed up by the Company, then according to the Commissioners' approval, the Whistleblowing System investigation can cooperate with experts or consultants (external investigators) and or with the authorities.

## Violation Reporting System (SPP) Mechanism

The Company has established a reporting mechanism to follow up complaints from employees or stakeholders in accordance with the Company's Whistleblowing System Procedures through means of email, facsimile and SMS.



## Perlindungan Bagi Pelapor

Dalam pelaksanaan pengaduan/ penyingkapan, *Whistleblowing System* dipayungi oleh Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi.

Selain Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi, Perusahaan juga bertanggungjawab atas perlindungan saksi. Sebagaimana tercantum dalam Prosedur *Whistleblowing System*, ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor diatur sebagai berikut:

- Menjamin kerahasiaan pelapor, dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor.
- Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor yang merupakan karyawan dari hal-hal sebagai berikut:
  1. Pemecatan yang tidak adil;
  2. Penurunan jabatan atau pangkat;
  3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*)

## Hasil dari Penanganan Pengaduan

Sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2019, tidak ada pengaduan yang masuk dan diproses, serta tidak ada sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses.

## Protection for Whistleblowers

In the implementation of complaints/disclosures, the Whistleblowing System is covered by Law No. 13 of 2006 concerning witness protection.

In addition to Law No. 13 of 2006 concerning witness protection, the Company is also responsible for witness protection. As stated in the Whistleblowing System Procedure, the provisions regarding protection for whistleblowers are regulated as follows:

- Ensuring the confidentiality of the Whistleblower, in carrying out the process of following up on every complaint/disclosure must prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence and professionalism.
- The company is committed to protecting the Whistleblowers in good faith and the company will comply with all relevant laws and best practices that apply in the implementation of the reporting protection system.
- The Company provides protection to Whistleblowers who are employees of the following matters:
  1. Unfair dismissal;
  2. Job or rank demotion;
  3. Harassment or discrimination in all its forms; An adverse record in his personal data file (personal file record)

## Complaints Handling Outcome

As end of 2019 reporting period, there is no complaints were received and processed, and there were no sanctions/follow-up on complaints that had been processed.

# Literasi dan Edukasi

## Literacy and Education

### Tanggung Jawab Produk

Pembiayaan sebagai bisnis utama Perseroan perlu diiringi dengan edukasi yang tepat agar nasabah memiliki informasi yang cukup dalam menerima layanan dari Perseroan. Perseroan juga menyediakan jalur komunikasi khusus bagi nasabah agar memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi dengan Perseroan.

### Product Responsibility

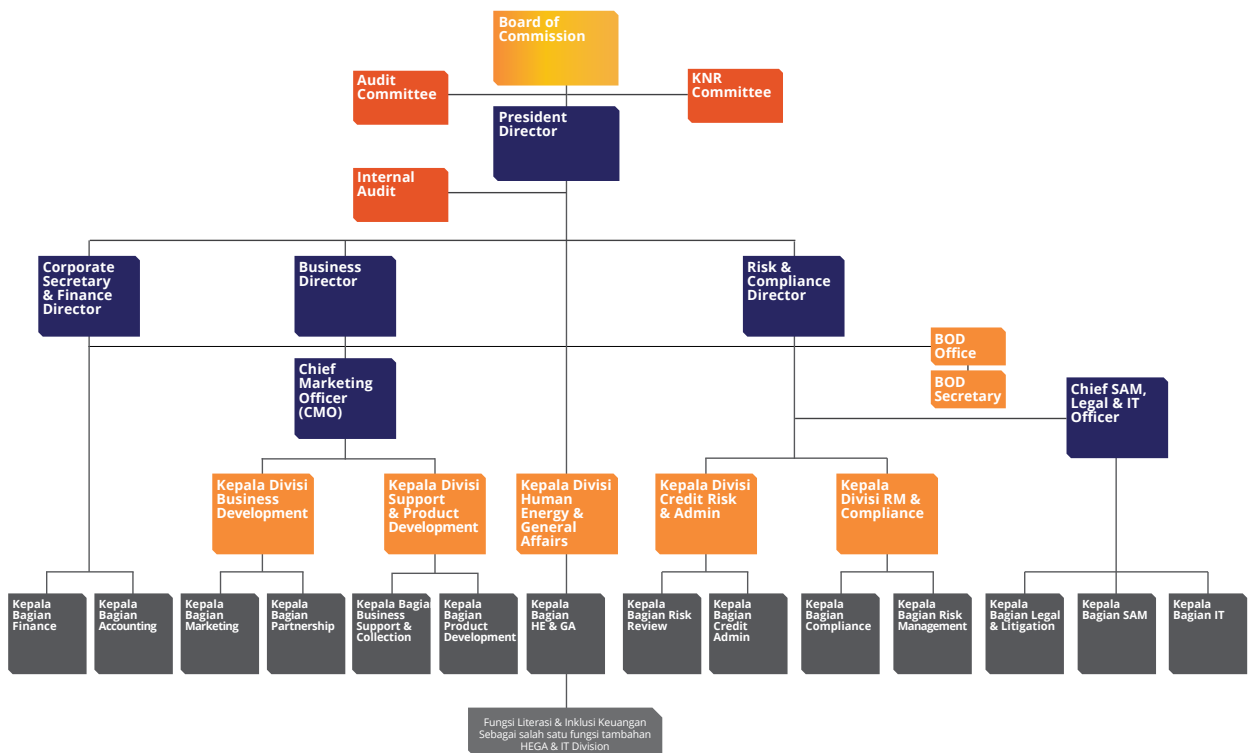
Financing as the Company's main business needs to be accompanied by appropriate education so that customers have sufficient information in receiving services from the Company. The Company also provides special communication channels for customers to obtain convenience in accessing information and conducting transactions with the Company.

### Literasi dan Inklusi Keuangan

Perseroan secara konsisten merencanakan dan melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Struktur organisasi yang menjalankan fungsi literasi dan inklusi keuangan dalam tubuh Perseroan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

### Literacy and Financial Inclusion

The Company consistently plans and implements Financial Literacy and Inclusion activities, with reference to Financial Services Authority Regulation No: 76/POJK.07/2016 concerning Improving Financial Literacy and Inclusion in the financial services sector for consumers and/or the public. The organizational structure that performs the functions of financial literacy and inclusion in the Company's body can be described as follows:



Perseroan telah memberikan laporan rencana kegiatan literasi keuangan tahun 2019 yang disampaikan ke OJK melalui Laporan Rencana Tahunan pada bulan Januari 2019 dan SIPEDULI pada bulan Februari 2019, dimana realisasinya berjalan sesuai rencana dengan kegiatan sebagai berikut:

The Company has provided an activity plan report of financial literacy in 2019 and was submitted to the OJK through the Annual Plan Report in January 2019 and SIPEDULI in February 2019, where the realization went according to plan with the activity as follows:

## Kegiatan Literasi Edukasi Tahun 2019

Educational Literacy Activities in 2019



11  
01

Workshop Interaktif dengan tema "Motivasi Kerja" oleh Bpk. Sutrisno Yulianto

Interactive Workshop with theme "Work Motivation" by Mr. Sutrisno Yulianto



22  
03

Sosialisasi POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Pengelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan oleh Ibu Yunita R. Riyadi

POJK No. 35/POJK.05/2018 concerning the Operation of a Financing Company Business by Mrs. Yunita R. Riyadi.



05  
07

**Sosialisasi Kebijakan Program Restrukturisasi oleh Ibu Yunita R. Riyadi**  
Socialization of the Restructuring Program Policy by Mrs.Yunita R. Riyadi



04  
10

**Pelatihan Dasar dan Aplikasi Alat Berat oleh Bapak Hadi Susetyo (Product Manager PT Intraco Penta Prima Service)**

Basic Training and Heavy Equipment Application by Mr. Hadi Susetyo (Product Manager of PT Intraco Penta Prima Service)



25  
10

**Pemahaman Laporan Keuangan Sederhana oleh Bapak Alexander Reyza**

Understanding Simple Financial Statements by Mr. Alexander Reyza

Iktisar Penting  
Significant Highlights

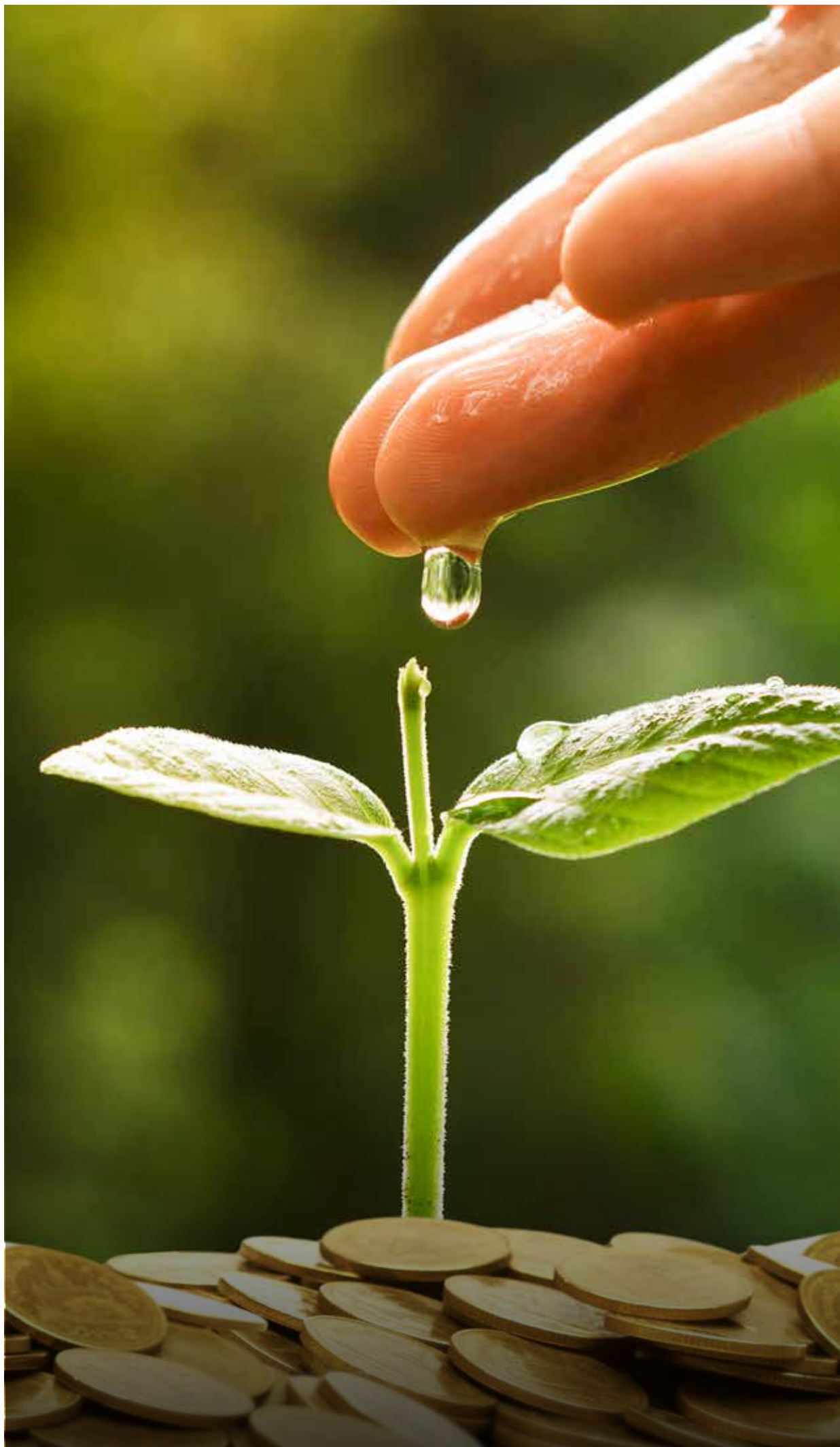
Laporan Manajemen  
Management Report

Profil Perusahaan  
Company Profile

Analisa & Pembahasan Manajemen  
Management Discussion & Analysis

TATA KELOLA PERUSAHAAN  
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Corporate Social Responsibility



A hand is shown from the top left, holding a coin. Below it is a large pile of coins. The background is a soft, out-of-focus green. The text is overlaid on the lower half of the image.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social  
Responsibility

5



**Kepercayaan Masyarakat kepada Perseroan, merupakan energi dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Untuk itulah, wujud kepedulian Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan memiliki arti bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan.**

Trust of the society to the Company becomes the energy in running the business in a sustainable manner. The social responsibility program is a concrete manifestation showing that the Company is aware and concern to the society as well as surrounding environment in order to maintain sustainability of the Company's business.

Untuk meningkatkan kinerja Perseroan pada 3 (tiga) aspek dasar (*triple bottom lines*), yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sebagai perusahaan yang mempunyai kepatuhan yang baik (*good compliance corporation*) dan perusahaan dengan tata kelola yang berkelanjutan (*good sustainability governance*), Perseroan berperan aktif dalam memperbaiki dan membangun

As an effort to improve performance, the Company adapts 3 (three) basic aspects (*triple bottom lines*), which include economic, social, and environmental aspects, as well as to establish a company with good compliance (*good compliance corporation*) and companies with sustainable good governance (*good sustainability governance*). The Company actively contributes in improving and building

lingkungan untuk menjadi lebih baik, serta menjadikan masyarakat mandiri dalam ekonomi dan mengelola lingkungan.

Program CSR Perseroan dikoordinasi oleh Divisi *Corporate Secretary* yang bertugas menyelaraskan program, melakukan analisis, menyusun perencanaan, pelaksanaan hingga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar, program CSR Perseroan difokuskan pada beberapa bidang utama, yaitu pengembangan sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan lingkungan.

the environment to be better, as well as creating and independent society in economics aspect as well as conserve the environment.

The Corporate Social Responsibility (CSR) program is coordinated under Corporate Secretary Division which is in charge to align the program, conducting analysis, planning, implementing and evaluating the implementation of activities. Broadly speaking, the Company's CSR program is focused on several key areas, such as social and community development, education and the environment.

## Tanggung Jawab Sosial Terkait dengan Lingkungan Hidup

Social Responsibility Related to Environment

### Kebijakan

Perseroan berkomitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kegiatan usahanya berdampak baik bagi lingkungan. Upaya Perusahaan diwujudkan melalui partisipasi dalam kelestarian lingkungan. Bagi Perseroan program CSR ini memiliki arti lebih dari sekadar perwujudan tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan, akan tetapi melalui program ini Perseroan yakin bahwa tujuan pengembangan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari akan dapat tercapai.

### Policy

The Company is committed to achieve sustainable development goals, as well as assure that our business generate positive impact to the environment. The Company's initiative is manifested through participation in environment conservation. The Company views this CSR program having deeper meaning beyond manifestation of our responsibility to the environment, where through this program, the Company believes that sustainable stakeholders and environment development goals will be achieved.



## Program Lingkungan Hidup yang Berhubungan dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Program yang secara tidak langsung dan sangat berperan dalam usaha Perseroan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah pemanfaatan energi listrik. Dalam aktivitas sehari-hari, Perseroan selalu memperhatikan lingkungan hidup. Komitmen Perseroan untuk memadukan kepentingan ekonomi (*profit*), kepedulian sosial (*people*) dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) dalam operasi bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan program CSR penghematan penggunaan energi Listrik di lingkungan kantor Perseroan. Program ini bertujuan mengurangi penggunaan energi listrik.

Aktivitas bisnis yang dilakukan Perusahaan senantiasa telah terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan. Perusahaan berupaya mengajak masyarakat secara luas untuk senantiasa menyadari pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Dengan begitu, Perusahaan dapat menjangkau lebih luas dalam berkontribusi pada lingkungan melalui penggunaan energi yang efisien baik penggunaan kertas maupun bahan bakar minyak.

Total biaya yang dikeluarkan untuk Pengelolaan Lingkungan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp28,5 juta.

## Environmental Program Related to Operational Activity

The programs that have non-direct impacts and consequences in the Company's environment conservation initiative includes electricity use. In daily activities, the Company always has an awareness to the environment. The Company's commitment to integrate economic interests (*profit*), social awareness (*people*) and active participation in environmental conservation (*planet*) in business operations is manifested in form of CSR programs development to reduce electricity use in the Company's offices. This program is intended to reduce electrical energy consumption.

Business activities carried out by the Company have always been integrated with environmental conservation plans. The company strives to invite the broader community to always aware on the importance of environment conservation. Therefore, the Company will have greater reach in contributing to the environment through efficient energy use either in paper or oil fuel consumption.

Total budget allocated for Environmental Management in 2019 achieved Rp28.5 million.

# Tanggung jawab Sosial Perusahaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility on Occupational Health and Safety

## Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam mencapai target dan produktivitas yang optimal, Perseroan telah menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Untuk itu, Perseroan telah melakukan penerapan Sistem Manajemen K3.

Setiap unit kerja dalam Perusahaan telah melakukan identifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, menetapkan upaya pengendaliannya melalui program, dan melaksanakan program yang telah disusun. Secara periodik, dilakukan evaluasi terhadap penerapan program untuk memastikan efektivitas penurunan risiko bahaya telah sesuai dengan rencana yang digunakan sebagai input data dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

Selain itu, Perseroan juga membekali karyawan dengan berbagai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## Pelatihan K3 bagi Karyawan

Kejadian kecelakaan kerja serius atau berakibat kehilangan jam kerja mendorong Perseroan untuk terus melakukan berbagai program pelatihan terkait dengan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk membantu karyawan beserta keluarganya mencegah terjadinya kecelakaan. Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan dengan :

1. Pemasangan slogan – slogan dan rambu – rambu K3.
2. Pemasangan leaflet

## Occupational Health and Safety (OHS) Management

In achieving optimal targets and productivity, the Company has created a safe, comfortable and healthy work environment. Therefore, the Company has implemented OHS Management System.

Each work unit within the Company has identified hazard potentials, assessed risk level, stipulate its control efforts through the program, and implemented the designated programs. Evaluation on the implementation of the program is carried out periodically to ensure effectiveness of the hazard risk reduction based on the plan applied as the data input in determining further corrective plans.

In addition, the Company also equipped the employees with various Occupational Safety and Health aspects.

## OHS Training for Employees

Severe work accident or causing loss of working hours has encouraged the Company to continuously provide training program related to occupational health and safety for the employees. This is done to help the employees and their families to prevent work accident. The Occupational Health and Safety Campaign is done through activities, as follows:

1. Installation of OHS taglines and signages.
2. Installation of leaflets.

## Hak dan Kewajiban Karyawan

1. Setiap karyawan yang bekerja berhak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk keselamatan kerja.
2. Karyawan wajib diberikan pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui berbagai kesempatan

## Layanan Kesehatan

Secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali Perseroan mengadakan *Medical Check Up* (pemeriksaan kesehatan) bagi Karyawan Tetap yang mempunyai masa kerja selama 3 (tiga) tahun ke atas.

## Kesempatan Kerja yang Sama Bagi Setiap Karyawan

Dalam Bidang HAM (Hak Asasi Manusia) Perusahaan melaksanakan Aktivitas Tanggung Jawab Sosial deyang diterapkan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :

- Kesetaraan Gender, Perusahaan tidak membedakan Agama, Ras, Suku dan Golongan sesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2003.
- Aspek kesejahteraan; Perusahaan, penerapan Sistem Pengupahan yang berkeadilan, memberikan perlindungan kesehatan dan perawatan karyawan dan keluarganya, Memberikan program Jamsostek, Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun, Memberikan Bonus, insentif dan THR
- Aspek keselamatan kerja; Perusahaan menjalankan K3, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja
- Aspek Pengembangan; dengan mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja berdasarkan Training Need Analysis.

## Employee Rights and Obligations

1. Every employees are entitled upon BPJS Ketenagakerjaan for occupational safety.
2. Employee shall be provided by Occupational Health and Safety knowledge through various occasions.

## Health Care

Regularly 1 (once) in a year, the Company held Medical Check-Up for Permanent Employees with more than 3 (three) years work period.

## Equal Work Opportunity for Employees

In Human Rights (HAM) aspect, the Company implemented Social Responsibility Activity that is implemented by considering several aspects, as follows:

- Gender Equality. The Company does not discriminate Religion, Race, Ethnicity and Group as mandated in Law No. 13 of 2003 on Employment.
- Welfare Aspect; Implementation of fair Payroll System, provide health insurance for employees and their families, provide Jamsostek program, Life Insurance and Pension Funds, Bonus, Incentives and Religious Day Allowance.
- Occupational Safety Aspect. The Company protects occupational health and safety.
- Development Aspect; Provide training based on employee's competency based on Training Need Analysis.

# Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility in Community Aspect

## Kebijakan

Penerapan visi dan misi CSR Perseroan dalam bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dimanifestasikan melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis dengan tujuan:

- Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan sosial

Pemberdayaan masyarakat di bidang Sosial merupakan pemberdayaan kondisi masyarakat (komunitas) lingkungan, berupa bantuan lepas (pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, dan bencana alam) dan bantuan khusus lainnya yang berasal dari Keluhan Masyarakat.

## Kegiatan

Aktivitas CSR Perusahaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana sosial, serta bentuk donasi lainnya yang dijalankan Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

## Policy

Implementation of the Company's CSR vision and mission in social and community development aspect is manifested through the strategic plans implementation with purposes, as follows:

- To create harmonious relationship between the company and society.
- Community development in Economics and Social aspects.

Community development in social aspect includes empowerment of the society (community) and environment, in form of one time donation (public facilities and infrastructure development, prayer sites, environment conservation, health improvement, education and training and natural disasters) and other special assistance based on complaints from the society

## Activity

CSR activity of the Company related to social and community development, such as community development in the Company's neighborhood through public economy capacity improvement, social facilities and infrastructure renovation, as well as other donations provided by the Company throughout 2019 is as follows:



1

### DONOR DARAH

Blood Donation

Bekerja sama dengan dengan CSR PT Intraco Penta Tbk, Perseroan secara rutin menggelar aksi donor darah. Pada tahun ini, kegiatan donor darah telah dilakukan pada tanggal 20 Februari 2019. Melalui kegiatan tersebut Perseroan berhasil mengumpulkan sekitar 70 orang pendonor.

In collaboration with CSR of PT Intraco Penta Tbk, the Company also held blood donation event. In this year, the blood donation was held on February 20, 2019. In this event, the Company successfully collected around 70 blood donors.



2

### BUKA PUASA BERSAMA DAN SATUNAN ANAK YATIM

Breakfasting and Orphans Charity Events

Sebagai bagian dari masyarakat, Perseroan secara konsisten memberikan sejumlah bantuan ataupun donasi yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Pada tanggal 21 Mei 2019, Perseroan melaksanakan kegiatan buka puasa Bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim yang diikuti oleh ± 100 peserta yang terdiri dari 25 anak

As part of the society, the Company consistently gives aid or donation with purpose to ease life burden of the society. On May 21, 2019, the Company held Breakfasting and Orphans Charity events participated by ± 100 participants comprising of 25 orphans, counsellors, Company's employees, and representatives from each subsidiary of PT Intraco Penta Tbk.

yatim, pembimbing, karyawan Perseroan, dan perwakilan dari masing-masing anak usaha PT Intraco Penta Tbk. Program ini dilaksanakan di Auditorium Lantai 5, Inta Building, Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 3,5. Jakarta Utara.

This program was held at 5th Floor Hall, Inta Building, Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 3.5, North Jakarta.

3

### SUMBANGAN SEMBAKO DALAM RANGKA BULAN SUCI RAMADHAN 1441 HIJRIAH

Basic Food Donations in the Holy Month of Ramadan 1441 Hijri



#### a. Sekolah SAJA

Upaya Perseroan untuk berperan aktif dalam kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional dilaksanakan juga melalui program kerjasama dengan pihak lain, yakni berupa Sumbangan untuk Acara Buka Puasa Bersama pada Sekolah SAJA yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara, dengan murid-murid yang berada di sekitar kolong tol Tanjung Priok-Pluit dan bantaran rel kereta api. Perseroan berpartisipasi memberikan sumbangan dana serta Sembako dalam rangka acara “Ramadhan Berbagi” di Sekolah Anak Jalanan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2019.

#### a. Sekolah SAJA

The Company's initiative to participate actively in care to the society in the operational area neighborhood was also carried out through partnership with other parties, in form of Charity in Breakfasting Events at Sekolah SAJA located in Penjaringan, North Jakarta, with students located at under Tanjung Priok – Pluit Toll Road and along the railways. The Company participates by giving cash and groceries package charities in “Ramadhan Berbagi” event at Homeless Child School held on May 25, 2019.

**b. Pesantren Putri Assyafiyah bulan Mei 2019**

Program berbagi lainnya yang dilaksanakan Perseroan yaitu berpartisipasi dalam acara buka puasa Bersama yang diadakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Pesantren Putri Assyafiyah. Pada program ini Perseroan turut berpartisipasi memberikan sumbangan dana.

**b. Assyafiyah Female Islamic Boarding School in May 2019**

Other various charity programs held by the Company included participation in breakfasting events held by the Indonesia Financing Company Association (APPI) at Assyafiyah Female Islamic Boarding School. In this program, the Company also participates to give funds charity.

**c. Kegiatan Literasi Keuangan Bank Sampah**

**c. Waste Bank and Financial Literacy Activities**



Perseroan memahami bahwa keuangan inklusif merupakan kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan kesempatan belajar manajemen keuangan dan pengenalan berbagai produk dan layanan jasa keuangan untuk membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan yang tepat.

The Company realizes that inclusive finance is key to increase welfare of Indonesian people. In order to support sustainable development goals, the Company is committed to provide financial management learning opportunity and introduction to various financial products and services to help the society in taking the correct financial decision.

Perseroan menghadirkan program edukasi

The Company presents financial education

finansial dengan sasaran Masyarakat dari Bank Sampah di wilayah Kampung Sawah RT/RW 010/011, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara serta beberapa karyawan Perseroan, dan perwakilan dari PT Intraco Penta Tbk, program ini diikuti oleh ± 17 peserta yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019.

Perseroan mengajak peserta berkenalan dengan jenis-jenis Laporan keuangan supaya dapat dipraktekkan pada komunitas bank sampah tersebut. Langkah ini merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan pengetahuan dasar pengelolaan keuangan lewat pemaparan mengenai Laporan Keuangan yang sederhana yang mencakup format dan tata cara pembuatannya.

Adapun total biaya dan/atau Investasi yang dikeluarkan Perseroan untuk menjalankan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan masyarakat tercatat sebesar Rp100 juta.

program targeting Society from Waste Bank at Kampung Sawah RT/RW 010/011, Samper Timur Sub-District, Cilincing District, North Jakarta and some of the Company's employees, and representatives from PT Intraco Penta Tbk., this programs was participated by ± 17 participants and held on October 25, 2019.

The Company invites the participants to explore various types of financial statements to be applied in the waste bank community. This initiative becomes one of the Company's effort to increase basic financial management knowledge through simple Financial Statements presentation that include the preparation format and procedures.

Total budget and/or investment allocated by the Company to implement Corporate Social Responsibility activity program in social and community development program achieved Rp100 million.



# Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Corporate Social Responsibility related to Responsibility to The Customers

## Kebijakan

Perseroan memiliki komitmen untuk memenuhi tanggung jawab dalam perlindungan nasabah. Perseroan menyadari makna penting dan manfaat dari pemenuhan standar kualitas serta perlindungan konsumen terhadap setiap produk/jasa yang dihasilkan, mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan kinerja usaha secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perseroan menetapkan dan memberlakukan kriteria yang ketat dalam proses dan output maupun pengawasan kualitas setiap produknya.

## Kegiatan

Perseroan memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permintaan dan keluhan konsumen sebagai bagian dari komitmen pelayanan. Perseroan meyakini penerapan komitmen pelayanan terbaik akan mampu mendukung target peningkatan kinerja di masa mendatang. Untuk menjamin pelayanan pada pelanggan, Perusahaan membuka layanan pengaduan dengan menyediakan saluran telepon, email maupun surat kepada pelanggan.

## Sarana Pengaduan Konsumen

Perseroan menyediakan sarana pengaduan konsumen melalui berbagai saluran komunikasi, antara lain email:

**customer.care@ibf.co.id**

## Policy

The Company has a commitment to fulfil responsibility in customer protection. The Company realizes crucial meaning and benefit from the fulfilment of quality standard and customer protection in every delivered products/service, considering both have significant impact on sustainable business performance. Therefore, the Company has stipulated and applied tight process criteria and output as well as quality monitoring on every product

## Activity

The Company gives quick feedback to the customers' inquiry and complaint as part of our service commitment. The Company believes implementation of excellent service commitment will support performance improvement target in the future. To assure services to the customers, the Company .

## Customer Care

The Company provides customer care via various communication channels, namely through email:

**customer.care@ibf.co.id**

## Tindak lanjut Atas Pengaduan Konsumen

Selama tahun 2019, Perseroan telah melayani sebanyak 4 (empat) aduan konsumen. Seluruh aduan konsumen telah diselesaikan dengan baik oleh Perseroan dengan tingkat penyelesaian 100%.

## Follow-Up on Customer Complaint

Throughout 2019, the Company has processed 4 (four) customer complaints. All of the inquiries, customer care and other information have been settled appropriately by the Company's with settlement rate of 100%.